



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN MENTERI PERTANIAN RI DAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN**

**(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, SERTA
KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: IV (empat)
Rapat Ke	: 5
Jenis Rapat	: Raker
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 18 Maret 2021
Waktu	: 10.30–14.30 WIB
Tempat	: Kantor/ Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
Ketua Rapat Acara	: Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI : Membahas Persiapan dan Ketersediaan Pangan menghadapi Bulan Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan.
Sekretaris Rapat	: Drs. Achmad Agus Thomy/Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 45 dari 54 Anggota Komisi IV dengan rincian:

1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)

10 dari 12 orang Anggota

1. Sudin, SE. (Ketua Komisi IV DPR RI)
2. Riezky Aprilia, S.H., M.H.
3. H. Sunarna, S.E., M.Hum.
4. Ir. Mindo Sianipar
5. Ono Surono, S.T.
6. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si
7. Vita Ervina, S.E., MBA
8. Drs. I Made Urip, M.Si
9. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
10. Maria Lestari, S.Pd.

- 2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)**
7 dari 8 orang Anggota
 1. H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
 2. H.M. Salim Fakhry, S.E., M.M
 3. Budhy Setiawan
 4. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
 5. Ir. Ichan Firdaus
 6. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H
 7. Alien Mus, S.H.

- 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)**
7 dari 7 orang Anggota
 1. G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
 2. Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, MM.
 3. Ir. Endro Hermono, M.B.A
 4. Renny Astuti, S.H., S.PN.
 5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess, M.Sc.
 6. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
 7. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si

- 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)**
5 dari 6 orang Anggota
 1. Drs. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
 2. Yessy Melania, S.E
 3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
 4. H. Sulaeman L Hamzah
 5. Julie Sutrisno

- 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)**
2 dari 6 orang Anggota
 1. Anggia Erma Rini, M.K.M(Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
 2. H. Muhtarom, S.Sos
 3. Daniel Johan
 4. Edward Tannur, S.H
 5. H. Irmawan, S.Sos., M.M
 6. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A

- 6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)**
5 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Suhardi Duka, M.M
 2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 3. Muslim, S.HI., M.M.
 4. Hj. Nur'Aeni, S.Sos., M.Si.

5. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

5 dari 5 orang Anggota

1. Drh. H. Slamet
2. Dr. Hermanto, S.E., M.M
3. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
4. H. Johan Rosihan, S.T
5. Saadiah Uluputty, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

3 dari 4 orang Anggota

1. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
2. Haerudin, S.Ag, M.H
3. Slamet Riyadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. K.H. Asep A. Maoshul, S.Sy.

B. Pemerintah:

1. Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H.
(Menteri Pertanian) beserta jajaran; dan
2. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri
Kelautan dan Perikanan) beserta jajaran.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Kita mulai.

Ini ada surat kuasa dari Inspektorat Jenderal dan Kelautan Perikanan memberikan kuasa kepada Ir. Nirwan untuk menghadiri Rapat Kerja.

Anggota bagaimana? Oke.

Yang kedua, ada surat kuasa yang dua. Satu dari Pak Antam ke Pak TB, satu dari Pak Antam ke Pak Syarif. Mana yang benar ini?

Ada 2 surat lagi. Yang satu dari Pak Antam selaku Sekjen memberikan kuasa kepada Pak TB Chairul Rahayu. Satu lagi Pak Antam sebagai Plt, memberikan kuasa kepada Profesor Ir. Syarif Wijaya. Kita setuju teman-teman ya karena bersangkutan masih ada urusan. Kita mulai.

Bismilahirrahmanirrahim.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Republik Indonesia.

Yang terhormat Menteri Pertanian beserta jajaran.

Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajaran, serta Hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja pada hari ini. Sesuai jadwal acara rapat Masa Sidang IV Tahun 2020-2021 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tanggal 19 Januar 2021 dan keputusan Rapat Internal tanggal 10 Maret, pada hari ini Kamis 18 Maret Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas persiapan kesediaan pangan menghadapi Bulan Ramadhan serta Hari Raya Idul Fitri.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sesuai dengan Tatib Pasal 276 Ayat (1) Rapat Kerja ini kami nyatakan terbuka dan dibuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Rapat Kerja hari ini dimulai pada pukul 10.30 dan akan diakhiri pada pukul 14.30. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal

254 Ayat (2) Peraturan Tatib atau atas kesepakatan bersama, dengan agenda sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat,
2. Penjelasan Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap agenda hari ini,
3. Tanggapan Anggota Komisi IV,
4. Jawaban Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan,
5. Kesimpulan Rapat,
6. Penutup.

Apakah acara dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Rapat hari ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 15 Maret 2021 yang lalu. Beberapa hal yang menjadi catatan kritis Komisi IV antara lain mengenai carut marutnya data komoditas pertanian. Permasalahan terkait harga daging dan harga beberapa komoditas lain yang mengalami peningkatan seperti harga cabai, jagung pipil, serta permasalahan terkait tata kelola komoditas pangan nasional. Padahal dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian selalu disebutkan bahwa produksi melimpah dan memenuhi kebutuhan nasional. Beberapa hal tersebut memunculkan pertanyaan berikutnya, yaitu: sejauhmana keterangan yang diberikan akurasi dan akuntabelnya. Padahal pada tahun lalu Kementerian Pertanian sangat ngotot membangun agriculture war room yang kita ketahui bersama biayanya lumayan besar. Bagaimana eksistensi peralatan tersebut. Bukankah seharusnya alat tersebut bisa mendeteksi dini terkait dengan data produksi kita dengan lebih akurat. Komisi IV juga mengkritisi dasar keputusan yang dilakukan untuk rencana impor beras.

Jadi dalam RDP kemarin Bapak/Ibu, Komisi IV dengan tegas menolak impor beras 1 juta ton. Karena itu juga masukan dari Perum Bulog. Mengingat berdasarkan data BPS dan Kementerian Pertanian menjadi peningkatan produksi beras. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Pemerintah tidak mempercayai data dan prognosa dari Kementerian Pertanian.

Yang kami maksud yang tidak percaya adalah yang memutuskan untuk mengimpor beras. Dan ini enggak main-main dampaknya sangat besar sekali. Begitu ada informasi mengenai akan impor beras terjadi gejolak harga ditingkat petani. Yang petani harusnya mendapat keuntungan karena impor tersebut maka terjadi gejolak harga ditingkat petani.

Dengan demikian bagaimana perencanaan kegiatan dan anggaran dalam upaya meningkatkan produksi pertanian. Karena dalam pemahaman kami importasi merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan pangan. Dalam hal ini justru Komisi IV berpandangan bahwa bila benar produksi kita meningkat dan surplus, Kementerian Pertanian seharusnya mencari terobosan sehingga beberapa produk pertanian tersebut dapat diekspor. Jadi kita bisa menyanggah rencana impor karena alasan ketersediaan dalam negeri tidak mencukupi.

Kementerian Pertanian memiliki 4 orang Atase Pertanian. Satu di Roma, dua di Brusel, tiga di Tokyo, dan empat di Washington DC. Gerakan mereka untuk bekerja lebih aktif jangan hanya diam duduk manis dan malah memfasilitasi importasi produk pertanian ke negara kita.

Jadi Pak Menteri saran saya kalau punya Atase di luar itu tidak ada fungsi suruh pulang saja ke Indonesia. Karena biayanya cukup besar sekali itu, baik di Eropa, maupun di Amerika. Saya lihat juga enggak ada gerakan apa-apa kok. Saya berapa kali ke Tokyo, apa yang anda lakukan juga enggak ada. Saudara Menteri Pertanian bilang rencana importasi beras akan terlaksana pada tahun ini maka hari ini juga dapat diartikan bahwa produksi pangan dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional. Hal ini menjadi perhatian khusus Komisi IV apalagi dalam waktu dekat kita akan menghadapi puasa dan lebaran. Kita ketahui bahwa permasalahan mengenai ketersediaan dan gejolak harga pangan selalu menjadi sorotan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.

Dalam hal ini menjelang Ramadhan dan Idul Fitri trend harga menjelang Ramadhan merupakan siklus tahunan. Apabila kondisi memang kerap terjadi dan berulang kali setiap tahun Pemerintah seharusnya lebih siap dan antisipasi. Langkah yang diambil jangan bersifat kuratif dan sifatnya sementara saja. Namun langkah harus komprehensif dan terkoordinasi oleh seluruh pemangku kepentingan.

Komisi IV mengingatkan Pemerintah agar melakukan antisipasi dini potensi peningkatan kebutuhan pokok kenaikan harga pangan di masyarakat. Apalagi saat ini masyarakat masih trauma dengan pandemi Covid-19 dan masih berlangsung, ekonomi kita juga agak menurun, kemudian akan menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri, harga kebutuhan pokok naik, selesailah sudah penderitaan rakyat Republik Indonesia.

Komisi IV mengingatkan Pemerintah agar melakukan antisipasi kenaikan harga pangan, Pemerintah juga wajib melakukan perbaikan tata kelola distribusi pangan dalam negeri yang melibatkan seluruh pihak. Jangan sampai harga tertinggi di konsumen namun tidak dinikmati oleh produsen, petani, peternak, atau pembudidaya ikan. Jika hal ini terjadi artinya ada tata kelola yang salah.

Saudara Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, beserta jajarannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ikan, juga merupakan salah satu komoditas untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan dan gizi. Peran penting ikan dalam ketahanan pangan ditopang oleh produksi perikanan berdasarkan prognosa April-Mei 2021 sebesar 2,7 juta ton. Dengan kebutuhan sebesar 2,5 juta ton. Untuk itu produksi pengelolaan ikan skala mikro kecil, ketersediaan pasokan ikan harus terpenuhi baik jenis dan jumlahnya di pasar-pasar tradisional maupun modern dengan harga yang terjangkau.

Terkait hal ini Komisi IV menilai masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan antara lain belum jelasnya berapa angka data stok kesediaan ikan per Provinsi per komoditas. Masih banyak pelaku usaha yang produksinya belum terserap oleh BUMN sector kelautan dan perikanan dan pemasaran, sebaran Unit Pengolahan Ikan (UPI)/*cold storage* milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menggunakan *system* kerjasama KSO, beserta kapasitasnya ABF dengan BUMN bidang kelautan dan perikanan, Perinus maupun Perindo dan Pemerintah Daerah. Sehingga perlu menjadi perhatian untuk perbaikan kedepan. Melalui Rapat Kerja ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi guna menjawab persoalan-persoalan terkait persiapan dan kesediaan pangan menghadapi bulan Ramadhan.

Saudara Menteri Kelautan,

Kita lihat Perindo punya gudang dimana-mana. Ada cukup banyak di beberapa Provinsi tapi gudang itu bukan diusahakan oleh Perindo tetapi disewakan. Contoh, kemarin saya penasaran saya ke Muara Baru saya ngecek. Gudang itu sebagian besar kosong. Isinya pun bukan dia punya tetapi kavling per kavling disewakan.

Sebelum kami mengakhiri kata pengantar ini kami juga ingin menyampaikan catatan kepada Kementerian Pertanian terkait bagaimana jaminan lahan sawah pengganti yang terkena dampak proyek strategis nasional. Hal ini menjadi concern dari Pak Slamet (mana Pak Slamet). Nah Pak Slamet sangat concern mengenai pengganti lahan pertanian ini. Dan akan dimasukkan kedalam kesimpulan rapat sebagai konsekuensi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan untuk menyampaikan penjelasan terkait diatas.

Silakan Pak Menteri Pertanian atau Menteri Kelautan yang dahulu.

Silakan.

MENTERI PERTANIAN (Dr. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.H.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua.

Hamdan wa syukurillah walahaula walakuwata illa billah.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR Republik Indonesia yang sama kami hormati, muliakan,

Menteri Kelautan dan Perikanan beserta segenap jajaran yang sama kami hormati dan banggakan,

Bapak Sekjen, Kementan bersama seluruh jajaran Eselon I, II yang sempat hadir ditempat ini yang sama kami hormati,

Hadirin sekalian yang sama kami hormati.

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat wal'afiat. Mengawali Rapat Kerja pada hari ini perkenankan saya beserta segenap jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI atas undangan Rapat Kerja hari ini 18 Maret 2021. Dengan agenda pembahasan persiapan dan ketersediaan menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Tahun 2021.

Pimpinan, dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yang sebentar lagi akan kita hadapi perlunya antisipasi dengan baik terutama terkait dengan ketersediaan pangan pokok dimasyarakat. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dikarenakan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya pada saat Ramadhan dan Idul Fitri akan banyak disoroti perihal ketersediaan kecukupan sampai fenomenal lonjakan atau penurunan harga pangan yang dapat mengganggu kekhusyuk'an ibadah umat Islam. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada saat membuka Rakernas Kemendag di Istana Merdeka tanggal 4 Maret 2021 juga memperingatkan perlunya antisipasi khusus jaminan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan pokok saat bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriyah.

Terkait dengan itu Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang kami hormati, Kementerian Pertanian berkomitmen untuk menjaga pasokan kebutuhan pangan pokok masyarakat selama Ramadhan dan Idul Fitri, juga selama pandemi COVID-19.

Langkah yang diambil Kementerian Pertanian adalah melalui;

- a. Optimalisasi penyediaan pangan dalam negeri.
- b. Mempercepat proses impor dan komoditas pangan yang sepenuhnya dicukupi dan memang dalam data yang ada harus dipenuhi. Dari 12 komoditi ada bawang putih, daging sapi, kerbau dan gula, termasuk kedelai yang harus menjadi perhatian khusus dari kami.

Pimpinan, dan segenap Anggota Dewan yang kami hormati,

Dalam rangka menjaga kecukupan pangan beberapa bulan kedepan, Kementerian Pertanian telah membuat perhitungan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok berdasarkan data yang tersedia seperti data stok tahun sebelumnya, perkiraan produksi dalam negeri, perkiraan impor, dan perkiraan kebutuhan pangan masyarakat yang ada. Prognosa neraca pangan pokok sampai bulan Mei 2021 diperkirakan dalam keadaan cukup. Beras diperkirakan surplusnya diatas kurang lebih 12 juta ton. Begitu juga jagung surplusnya masih 2,40 juta ton. 2,4 juta ton. Khusus beras surplus yang terjadi karena pada Maret, April 2021 ini memasuki panen raya.

Berdasarkan hasil perhitungan sampai dengan minggu ke-2 Maret 2021 menunjukkan stok beras yang tersimpan diberbagai tempat seperti Bulog, penggilingan, pedagang, BIBC dan lainnya. Total stok mencapai kurang lebih 6 juta ton. Begitu pula surplus komoditi jagung. Panen pada awal tahun sampai dengan Mei 2021 merupakan puncak siklus paling besar yang memang setiap tahun selalu terjadi sebagai bagian penanaman awal musim hujan yang ada. Untuk komoditi lain diperkirakan juga tersedia dalam jumlah yang cukup, diantaranya komoditi bawang, cabe, daging ayam ras, telur, gula dan minyak goreng. Walaupun ketersediaan pangan diperkirakan cukup, namun beberapa komoditi masih harus mendapatkan dari luar negeri karena produk dalam negeri belum dapat memenuhi total kebutuhan masyarakat seperti kedelai, bawang putih, daging sapi.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri,

Kalau kita lihat kedelai ini kan perkiraan impornya 1.046.000. Setahu saya kebutuhan kedelai ini baik untuk industry maupun pakan hampir 6 juta lebih atau 7 juta. Coba saya minta. Saya enggak mau ada yang disembunyikan. Karena ini kan kalau 1.046.000 ini perkiraan impor berarti berapa kebutuhan pokok, baik untuk industry maupun untuk pangan.

MENTERI PERTANIAN:

Ini kedelai konsumsi maksudnya dalam rangka ketersediaan yang ada menghadapi.

KETUA RAPAT:

Tapi harusnya semuanya kan dicantumkan dong, impornya.

MENTERI PERTANIAN:

Jadi ini prognos kita menghadapi Ramdhan dan Idul Fitri saja. Kira-kira seperti itu.

KETUA RAPAT:

Kebutuhannya berapa?

Seluruhnya?

MENTERI PERTANIAN:

2,6 konsumsi.

KETUA RAPAT:

Konsumsi dan industri?

Untuk tahu, tempe berapa?

MENTERI PERTANIAN:

2,6.

KETUA RAPAT:

2,6.

MENTERI PERTANIAN:

Ini perkiraan yang ada. Yang kita memang kurang dan harus segera dipersiapkan. Untuk industri tidak dihitung Pak.

Ijin lanjut.

KETUA RAPAT:

Oke.

MENTERI PERTANIAN:

Walaupun telah diperkuat penyediaan melalui impor. Kita berharap memang melalui kerja keras pemenuhan ini dan kekurangan ini dapat terantisipasi seperti apa yang menjadi kebutuhan menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri tersebut.

Pimpinan, dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Dalam rangka menyakinkan publik terkait dengan jaminan ketersediaan bahan pokok saat memasuki Ramadhan dan Idul Fitri benar-benar tersedia secara fisik dan harga di petani terjaga dengan baik maka Kementerian Pertanian membuat berbagai langkah antipasi khususnya untuk beras sebagai berikut:

1. Mendorong Perpadai untuk menyerap gabah petani melalui optimalisasi fasilitasi RMU bantuan Kementan.
2. Melakukan sinergi dengan Bulog untuk meningkatkan serapan gabah petani melalui:
 - a. Berkoordinasi untuk penyerapan gabah kering panen, maupun gabah kering giling dibawah HPP.
 - b. Menginformasikan persyaratan mutu yang ditetapkan oleh Bulog kepada Poktan, Gapoktan dilokasi HPP yang jatuh.
 - c. Mengawal pelaksanaan penyerapan gabah dibawah HPP.
3. Kementerian Pertanian juga bekerjasama dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia dan PT Pertani untuk meningkatkan serapan gabah petani.

4. Mendorong Kepala Daerah mengoptimalkan fungsi dryer di sentra-sentra produksi yang ada.
5. Optimalisasi gudang atau lumbung cadangan pangan bekerjasama dengan Bulog dan Perpadai.

Khusus mengenai komoditi cabe dan bawang yang pada saat segera memasuki di Ramadhan dan Idul Fitri sering kali menjadi perhatian publik. Karena seiring terjadinya gejolak harga di konsumen. Maka pertanian mengambil langkah sebagai berikut:

1. Menyampaikan *early warning system* informasi ketersediaan cabe dan bawang bulan Maret, Juni 2021 ke Provinsi dan Kabupaten yang ada.
2. Melakukan konsolidasi dengan asosiasi dan pelaku usaha terkait upaya menjaga pasokan cabe dan bawang.
3. Percepatan pelaksanaan kawasan cabe dan bawang yang teralokasi pada Tahun 2021.
4. Koordinasi dengan BMKG dan Direktorat Perlindungan Hortikultura untuk prediksi dampak iklim di 3 bulan kedepan.
5. Percepatan penerbitan RIPH bawang putih dan ini menjadi bagian-bagian yang tentu berkaitan dengan Kementerian lain.

Langkah antisipasi yang sama juga dilakukan untuk membantu ketersediaan komoditi utama lainnya seperti jagung, kedelai, daging sapi dan kerbau, gula pasir dan minyak goreng, baik pemantauan produksi dan distribusi dari Daerah maupun pemantauan percepatan impor distribusi komoditi yang diimpor ke pasar pada saat yang diperlukan. Khusus untuk gula pasir telah dilakukan koordinasi pemantauan stok di pabrik gula (PG) dalam negeri dan gudang importir. Berdasarkan data yang tersedia menunjukkan stok gula pasir di pabrik gula diperkirakan mencapai 649.000 ton. Data secara rinci telah kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi IV yang terhormat seperti yang tersaji pada Raker hari ini.

Upaya koordinasi antar lembaga khususnya dalam rangka pengamanan pangan telah dilakukan Kementerian Pertanian terutama untuk, yang pertama meningkatkan koordinasi Kementerian dan Lembaga terkait dan para pelaku kebijakan Kemendag, Satgas pangan, BIN, Dinas Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam rangka stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok saat terjadi gejolak harga menjelang hari besar keagamaan nasional. Dan kedua mengintensifkan gelar pasar murah di berbagai wilayah pelaku usaha mitra dan BULOG.

Selain upaya pengamanan ketersediaan pangan seperti diuraikan diatas. Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan juga memantau perkembangan harga harian komoditas utama tersebut. Hal ini dilakukan guna mendeteksi kemungkinan terjadi peningkatan atau penurunan harga ekstrim sehingga berpotensi meresahkan masyarakat. Beberapa proyeksi komoditas utama sampai dengan Juni 2021 diurutkan sebagai berikut. Harga rata-rata beras di tingkat penggilingan dan eceran diprediksi masih dalam kondisi cukup stabil. Sampai dengan Bulan Juni 2021 walaupun terjadi trend dinamika harga relative antara penurunan 0,1% sampai 0,2%.

Yang kedua, proyeksi harga jagung pipil yang kering ditingkat panen sampai dengan Juni 2021 diperkirakan mengalami kenaikan namun sangat kecil yaitu hanya 0,016%. Tiga eceran bawang merah dan bawang putih cenderung naik hingga akhir Juni 2021 disebabkan karena peningkatan permintaan menjelang bulan puasa dan Idul Fitri. Perkiraan harga eceran bawang merah dan bawang putih Juni 2021 masing-masing sebesar 44.000 lebih per kilogram sampai dengan 30.000 per kilogram.

Yang keempat, sebaliknya harga cabe merah keriting dan cabe rawit ditingkat konsumen diperkirakan pada bulan Juni mengalami penurunan dibandingkan minggu ke-2 Maret. Perkiraan harga eceran sebagainya cabe merah keriting, dan cabe rawit Juni 2021 masing-masing antara 44.000 lebih per kilogram dan 52.000 lebih per kilogram.

Yang kelima, harga daging sapi ditingkat konsumen diprediksi mengalami kenaikan dibulan Mei namun pada akhir Juni diperkirakan mengalami penurunan.

Enam, harga eceran gula pasir pada bulan Mei diperkirakan stabil dan terjadi sedikit kenaikan dibulan Juni yaitu diperkirakan menjadi sebesar 13.800 per kilogram.

Pimpinan, dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Rapat Kerja pada hari ini. Kementerian Pertanian sekali lagi akan tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pangan menjelang dan selama Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadhan dan Idul Fitri. Apabila masih diperlukan penjelasan lebih rinci. Saya mohon perkenan Pimpinan agar Pejabat Eselon I yang menangani dapat diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan secara teknis.

Atas segala kekurangan dari apa yang kami sampaikan kami memohonkan pemakluman dan maaf. Dan atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI kami ucapkan terima kasih.

Wabillauhitaufiq Walhidayah.

Sekian.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam.

Sebelum kita lanjutkan. Disini saya perkenalkan Anggota baru di Komisi IV yang menggantikan Pak Hamid Noor Yasin.

Silakan Bu.

Perkenalkan diri Ibu pakai mic Bu.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pimpinan, dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri Pertanian, beserta jajaran. Menteri KKP beserta jajaran.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Saya Saadiah Uluputty Nomor Anggota: 458. Fraksi PKS, Dapil Maluku. Sebelumnya di Komisi VII ditugaskan Fraksi ke Komisi IV.

Demikian terima kasih Pak Ketua.

Saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu.

Selamat bergabung di Komisi IV. Kalau Ibu disana dapatnya mungkin dapat listrik tapi disini dapatnya *hand tracktor* dari Menteri Pertanian. Kemudian dapat perahu kapal untuk di Dapil Ibu dari Pak Menteri Perikanan.

Sebelum kita lanjutkan. Ada beberapa hal yang saya kritisi misalnya, saat ini harga singkong atau ubi kayu khusus di Lampung anjlok dibawah biaya produksi. Paling bagus harganya 600 sampai 650. Belum dipotong oleh maupun kotoran kurang lebih 25 sampai 30 persen.

Jadi petani di Lampung khususnya petani singkong itu sangat menjerit sekali. Dan saya ingatkan kepada Eselon I terkait maupun kepada Menteri Pertanian. Hari ini harga jagung sudah melonjak cukup tinggi. Saya ngecek terakhir minggu lalu saya ke Lampung, harga jagung dibeli oleh Fedmil hampir mencapai 4700. Dan ini cenderung akan naik terus sampai masa panen jagung besar. Apabila tidak diantisipasi maka terjadi kenaikan ternak yang cukup lumayan, baik itu ayam maupun yang lain-lain. Tolong diantisipasi, tolong dicek ke lapangan. Jadi Pak Wandu jangan jalan-jalan melulu. Harusnya Dirjen terkait ini keliling, mana sentra-sentranya itu dilihat, apa yang harus diantisipasi, apa yang harus dijaga.

Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Silakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Pimpinan.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semuanya.

Om Swastiastu.
Namo Budhaya.
Salam Kebajikan.

Yang saya hormati Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua, Bapak Menteri Pertanian beserta jajaran, dan seluruh Anggota Komisi IV.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan,

Kurang keras Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bapak agak dekat sedikit Pak mic-nya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan Rapat Kerja Gabungan antara Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna membahas persiapan dan ketersediaan pangan menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan.

Dalam Rapat Kerja hari ini perkenankanlah kami memulai dengan menyampaikan trend pasar dan global produk perikanan pada saat dan pasca COVID-19. Saat ini fokus konsumen global beralih pada produk siap saji. Suplier ke *food service* merupakan strategi menjadi ke pasar ritel atau penjualan langsung kepada konsumen. Selain itu terjadi peningkatan delivery online shooing dan take away. Promosi produk lokal dibeberapa negara pun meningkat seperti di Indonesia seperti gerakan nasional “bangga buatan Indonesia” pasar laut Indonesia. Inovasi juga semakin berkembang seperti kemasan, transportasi, dan perpanjangan umur simpan produk.

Berdasarkan analisis yang kami lakukan dari Tahun 2020 dan prognosa Tahun 2021, perkiraan kebutuhan ikan selama Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri yaitu dibulan April-Mei 2021 adalah sebesar 2.522.500 ton. Adapun prognosa ketersediaan ikan sebesar 2.696.000 ton. Dengan demikian prognosa pasokan ikan diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Pimpinan, dan Wakil Pimpinan, Anggota Komisi IV DPR RI, Bapak Menteri Pertanian, dan seluruh jajarannya.

Permintaan ikan diprediksi akan meningkat di minggu pertama puasa, kemudian akan stabil di minggu kedua hingga lebaran. Permintaan ikan akan menurun pada saat lebaran. Lalu stabil kembali di H+3 lebaran, dan kemudian H+7 meningkat untuk keperluan hotel, restoran, catering dan oleh-

oleh. Permintaan ikan di beberapa daerah berbeda komoditasnya terutama untuk komoditas yang menjadi makan khas daerah tersebut atau terdapat tradisi untuk mengkonsumsi untuk jenis-jenis ikan tertentu. Harga ikan dan pasokan sebelum puasa diprediksi akan stabil. Namun pada minggu pertama puasa harga ikan akan mengalami kenaikan sebesar 5 sampai dengan 15 persen, dan diprediksi akan kembali normal pada minggu ke-2 sampai menjelang lebaran. Permintaan ikan untuk hotel dan restoran diperkirakan masih mengalami penurunan akibat pengaruh pandemi. Demikian juga untuk permintaan ikan untuk catering. Peningkatan permintaan ikan untuk pasar retail modern terjadi untuk jenis tertentu seperti gurame, udang, nila dan kakap.

Pada saat puasa dan lebaran Tahun 2020, komoditas yang mengalami kenaikan harga yaitu cakalang, kembung dan tongkol dengan kenaikan rata-rata 10%. Sedangkan untuk komoditas bandeng dan tuna pada saat puasa dan lebaran Tahun 2020 cukup stabil mengalami penurunan harga yang tidak signifikan. Di Tahun 2021 pada saat puasa dan lebaran diprediksi tidak akan jauh berbeda dengan Tahun 2020. Ada pun strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga ikan antara lain: yang pertama program peningkatan produksi budidaya.

Yang kedua konsolidasi dan komunikasi dengan supplier besar, asosiasi, BUMN perikanan, retail modern, rumah makan dan Dinas KP untuk mengamankan pasokan dan harga ikan. Yang ketiga fasilitasi sarana cold storage dan kendaraan berpendingin. Yang keempat, pengembangan koridor logistic ikan, yang kelima implementasi system resi gudang komoditas ikan. Yang keenam, bazar produk pasar ikan murah online dan offline bekerjasama dengan instansi terkait. Yang ketujuh, monitoring pasokan dan harga ikan melalui pemantauan harga dan stok ikan melalui portal satu data KKP. Pemantauan langsung oleh KKP ke kota-kota besar di Indonesia.

Disamping itu pada bulan Ramadhan 1442 Hijriyah, KKP juga akan mengadakan bazar virtual Ramadhan UKM produk perikanan dengan target peserta sebanyak 500 UMKM. Kegiatan ini dapat diakses melalui media social gemar ikan.

Demikian yang dapat kami sampaikan pada Rapat Kerja kali ini. Seluruh saran, masukan dan rekomendasi dari Komisi IV DPR RI akan menjadi bahan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan KKP yang lebih baik.

Terima kasih atas dukungan Komisi IV DPR RI.

Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Om Santi Santi Santi Om.

Namo Budhaya.

Salam Kebajikan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasannya kepada Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan.

Perlu kita ketahui saat ini stok ikan agak kosong disemua *cold storage*. Karena apa? Karena angin barat atau anginnya sedang kencang-kencangnya ini. Betul enggak Dirjen? Betul? Berkurang kan pasokan kan? Ya karena ini siklus alam.

Kemudian Pak Menteri Pertanian, saya sangat tersinggung dengan kinerja anak buah Pak Menteri. 1 bulan lalu staf saya sudah telepon Kepala Badan Karantina untuk memusnahkan jahe yang campur tanah. 9 kontainer di Surabaya, 2 kontainer di Tanjung Priuk Alhamdulillah sampai hari ini belum dimusnahkan juga. Malah yang di Tanjung Priuk tambah lagi dari 2 jadi 4. Coba kita pikirkan, alangkah bahayanya jahe campur tanah masuk ke Indonesia. Sebelumnya pun saya tahu Cuma saya diam saja. Kasak kusuk kasak kusuk sudah jahenya dibersihkan saja supaya bisa keluar. Saya sudah ngecek sampai hari ini 9 dan 4 belum dimusnahkan juga. Saya enggak tahu harus ngomong apa lagi. 1 bulan lalu loh saya ngomong. Tolong ini dimusnahkan, tolong ini dimusnahkan. Karena ini kalau sampai keluar sangat berbahaya sekali. Coba Pak Sekjen diperhatikan itu. Saya juga sudah ngomong sama Pak Sekjen. 2 kali saya ngomong loh. Ini ketiga kalinya loh. Ya kalau ketiga kalinya tidak dilaksanakan saya akan laporkan ke pihak berwenang. Ini untuk menjadi perhatian kita semua. Kalau Pak Menteri mungkin jangkauannya enggak sampai kesana ke pelabuhan-pelabuhan itu.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

(suara tidak terekam).

KETUA RAPAT:

Iya sekalian enggak apa-apa. Juga saya minta waktu itu dengan Dirjen Hortikultura, membuat surat ke Kementerian Perdagangan. Bilang sama Kementerian Perdagangan, apabila memberikan ijin impor jahe jangan sama tanahnya. Loh iya memang kenyataannya begitu loh. Harusnya bikin suratlah. Kalau jahe, jahe saja jahe yang bersih. Jangan pakai tanah. Yang saya takutkan besok kalau ada impor jagung, jagungnya pakai bonggol. Ini untuk menjadi perhatian kita semua. Saya tunggu actionnya 1 minggu.

Terima kasih atas penjelasannya yang telah disampaikan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Anggota Komisi IV untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya.

Kami persilakan yang pertama.

KETUA RAPAT (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Ketua.

Untuk yang pertama juru bicara dari Fraksi Partai Gerindra Ibu Renny Astuti.

Kami persilakan.

F-GERINDRA (RENNY ASTUTI, S.E., S.PN):

Terima kasih Pimpinan.

Bismilahirrahmanirrahim.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Menteri Pertanian RI, dan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, beserta jajaran.

Mewakili Fraksi Partai Gerindra DPR RI, ijinkan saya menyampaikan beberapa tanggapan dan pertanyaan untuk Pak Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Yang pertama, kami dari Fraksi Partai Gerindra sangat menyesalkan atas pernyataan dari Menteri Perdagangan mengenai impor 1 juta ton beras akan berjalan terus dan tidak akan mengganggu harga gabah di petani. Pernyataan ini terjadi kemungkinan karena kurangnya koordinasi dengan instansi terkait. Padahal fakta dilapangan hampir seluruh daerah yang sedang panen raya gabah, harga gabah jauh dibawah HPP. Maka kami menyarankan kepada Menteri Pertanian agar dapat menjelaskan kondisi dan fakta dilapangan kepada Menteri Perdagangan. Kemudian informasi mengenai rencana impor beras 1 juta ton ini sangat viral sehingga mempengaruhi pasar. Oleh sebab itu kami berharap Kementan perlu untuk membuat pengumuman terbuka di media dan bekerjasama dengan BULOG untuk membuat call center terkait keseriusan dalam penyerapan gabah dan harga beras petani. Sehingga petani dapat menghubungi call center tersebut bila belum memiliki pasar dan mau menjual gabah dan beras yang sesuai dengan HPP.

Selanjutnya dalam optimalisasi penyediaan cabe dan bawang tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa akan berkoordinasi dengan BMKG untuk prediksi dampak iklim 3 bulan kedepan. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana tindakan dan strategi yang akan diambil oleh Kementerian Pertanian untuk mengatasi dampak iklim tersebut menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri

Selanjutnya untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami dari Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa pada Tahun 2021 merupakan tahun dengan penuh harapan. Harapan akan bangkitnya perekonomian nasional. Sektor perikanan merupakan sector yang sudah menunjukkan daya tahannya terhadap gempuran dari Covid-19 sehingga sektor perikanan merupakan sektor usaha nyata yang dapat menjadi ujung tombak utama

dalam pemulihan ekonomi nasional. Pertanyaan kami, apa pengaruh dan dampak dari trend pasar domestic dan global terhadap perikanan nasional dalam segi produksi, konsumsi ikan per kapita, nilai tukar nelayan saat ini per triwulan I Tahun 2021

Selanjutnya terkait dengan impor garam yang akan dilakukan oleh Pemerintah. Yang menurut informasi sebanyak 3 ton. Kami minta penjelasan mengenai ketersediaan garam rakyat, dan kami mendorong agar produk garam rakyat ditingkatkan karena sangat ironis sekali Indonesia punya laut yang sangat luas akan tetapi garam masih impor terus.

Kemudian saat ini KKP sedang gencar-gencarnya melakukan pengembangan sector perikanan budidaya. Kami memandang hal tersebut akan menjadi sia-sia apabila KKP tidak melakukan pengembangan kelembagaan di Daerah. Sebab budidaya perikanan memerlukan pendampingan dan pembinaan terutama bagi pembudidaya pemula. Kami mendorong KKP untuk melakukan pengembangan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan.

Demikian yang bisa kami sampaikan mewakili dari Fraksi Partai Gerindra. Selanjutnya mungkin nanti Kapoksi dari Partai Gerindra akan memberikan tambahan.

Terima kasih.

*Billauhitaufiq Walhidayah,
Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ijin Ketua, tambahan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Darori.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Menteri, teman-teman sekalian,

Saya ingin menyampaikan ya. ini juga bukan pertanyaan. Undang-Undang 11 Tahun 2020 sudah disahkan, mau tidak mau, suka tidak suka kita laksanakan. Tapi kenyataannya Pak Menteri berapa hari ini di Komisi IV itu hampir teman-teman secara pribadi itu menolak. Saya kira Bapak juga tahu kayaknya, contohnya di Undang-Undang Pangan sekarang. Di Undang-Undang Pangan yang lama Undang-Undang 18 Tahun 2012 dengan yang baru itu carut marutnya impor itu kadang-kadang Undang-Undang baru. Di Undang-Undang lama itu mengatakan sepanjang pangan disediakan oleh

dalam negeri tidak diadakan impor. Itu statement Pak Menteri kan dari dulu itu. Tapi kenyataannya di Undang-Undang baru tidak. Sumber pangan nasional adalah produk dalam negeri dan impor, dan impor enggak dilarang. Nah inilah yang mungkin Menteri Perdagangan berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) ini Pak. Sebetulnya Bapak tugasnya hanya di hulu tapi karena hilirnya enggak jalan Bapak merapat ke hilir akhirnya jadi sasaran. Ini faktanya Pak.

Yang kedua, Undang-Undang Pangan ini sudah direvisi Pak 20 Pasal. Tapi di Baleg kemarin Bapak tahu diperbaiki lagi. Memang yang mana Pak yang mau direvisi lagi. Saya mohon dijelaskan. Saya sebagai Anggota Baleg bingung juga Pak. Yang 20 saja belum dilaksanakan kok, gencar sekali di Baleg karena Baleg punya kewenangan untuk mengajukan mengusulkan menurut pandangan Baleg. Itu yang pertama.

Terus yang kedua Pak Menteri, KKP, juga Pak Menteri Pertanian. Ini mohon maaf Pak Menteri KKP, Bapak kemarin Kunker dibelakang rumah saya, saya enggak diundang. Di Kebumen. Jadi saya semua WA ke saya dikiranya sakit Pak. Pak Darori COVID ini. Saya ini gagah bergas ini kok covid gitu. Ya mohon maaf Pak Menteri, mungkin bukan Bapak yang salah. Mungkin protokolnya. Masa hari Jumat jam 08.00 baru ngasih tahu saya. Ya saya di Jakarta Pak. Ini bukan apa-apa, ini mungkin missed komunikasi. Kalau Menteri Pertanian ke Kebumen 6 kali Alhamdulillah saya diajak terus itu.

Terus yang kedua begini Pak ya, di KKP dan di Pertanian itu banyak ada masalah Pak. Masalah yang lama. Tadi saya didatangi wartawan TV juga ini khususnya pertanian Pak ya. Ini muncul ini Pak "menguapnya anggaran cetak sawah aparat hukum tak berkutik". Saya jawabnya gampang Pak. Ini oleh BPK belum dilimpahkan ke penegak hukum masih koordinasi dengan Kementan. Maksud saya Pak, tolong bentuk tim. Kalau memang itu percetakan selamanya gagal ya dihapus, dikesimpulan gagal. Timnya polisi. Kalau enggak seperti ini Pak numpuk Pak nanti Pak. Jadi tadi saya tanya, kenapa Pak? Enggak berkutik penegak hukum, belum sampai kesana. Ini masih koordinasi antar Kementerian Pertanian. Saya enggak tahu benar tidaknya tapi saya jawab seperti itu Pak. Tolong ini dibentuk Tim. Jangan sampai terjadi seperti ini. Juga di KKP Pak. Di KKP ini warisan yang lama banyak Pak. Ini makin nanya ke saya. Karena saya kebetulan Pak pernah 5 tahun kerjasama dengan KPK. Jadi wartawan wartawan di KPK itu seperti ... sudah disini kok. Ini tolong juga dibenahi.

Yang terakhir, saya ingatkan kepada Pak Menteri bahwa jabatan politik itu tidak bisa di bawa ke Birokrat Pak dan sebaliknya. Ini dulu dari staf camat Pak. Pak Menteri Pertanian. Kalau Bapak dari Kepala Desa Camat Eselon V sampai Eselon I dia paham lagi. Kalau di Birokrat uang 1 Rupiah dipertanggungjawabkan tapi kalau Anggota DPR 1 Miliar pun enggak dipertanggungjawabkan. Uang kantong sendiri soalnya.

Nah yang seterusnya Pak, saya pernah bicara dengan Pak Menteri. Saya pengalaman Pak. Kasus yang terjadi di Depsos dan di KKP ini perlu jadi pelajaran. Tolong Pak, cari anak buah itu jangan yang pintar saja tapi perlu

punya rasa loyal dan tanggungjawab itu kuncinya Pak. Saya pernah di KPK jadi saksi 5 orang Eselon I. Yang 3 ketakutan nyalahkan Menterinya. Yang satu netral tapi saya punya dokumen bahwa Menterinya enggak salah. Yang tiga itu katanya. Karena seorang saksi itu harus punya Pasal 1 Ayat (26) KUHAP itu.

KETUA RAPAT:

Pak Darori maaf saya potong. Kita bicara mengenai stok pangan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Iya ini karena menyangkut ini Pak.

KETUA RAPAT:

Tolong dipercepat Pak.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Iya. Alat bukti itu Pak melihat, mendengar dan mengalami Pak. Jadi teman-teman semuanya itu kalau enggak seperti itu jangan jadi saksi. Jangan sok tahu, rusak Pak. Hari-hari mesti dipanggil karena dialami terus kasus pangan ini. Dan tambah lagi keputusan MK 65 itu mengetahui peristiwa. Tolong Pak Menteri, teman-teman diajari diundang. Ini loh kewajiban anda. Bukan kerja saja kalau teknis tahu semua, ini kan Doktor semua Pak. Kita tahu semua. Tapi yang non teknis seperti ini rawan Pak.

Saya kira itu Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak Darori saya tambahkan sedikit saja, sedikit koreksi tadi. Bu Renny menyebutkan rencana impor untuk komoditas garam itu 3 ton. Yang benar 3 juta ton.

Terima kasih.

Sedikit Pak Menteri Pertanian, ya ini mungkin tadi sudah banyak masukan ke Bapak. Tapi terkait rencana impor beras ini yang benar-benar meresahkan para petani. Tadi Bapak membaca dari sambutan yang Bapak berikan, prognosa neraca pangan pokok sampai bulan Mei 2021 diperkirakan dalam keadaan cukup. Beras diperkirakan akan surplus 12,56 juta ton.

Pak Menteri,

Saya dan kami Komisi IV meminta kepada Bapak sebagai Bapak angkat para petani seluruh Indonesia untuk menyakinkan dalam hal ini Presiden bahwa kita tidak perlu impor beras. Kita sadar bahwa mungkin ada komoditas-komoditas lain yang memang harus. Enggak apa-apa. Tapi kalau Bapak menyakinkan kami dirapat ini dengan statement yang resmi bahwa beras diperkirakan surplus 12,56 juta ton. Kami sekali lagi sangat menyayangkan ada statement dari Pemerintah bahwa ada impor beras 1 juta ton. Apalagi mungkin kolega Bapak menyebutkan ini strategi besar. Mohon maaf Pak, ini strategi kalau strategi ini dianggap strategi ini sangat-sangat membunuh dan melukai para petani Pak. Karena kita sudah lihat harga gabah dilapangan diberbagai daerah dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, banyak yang jatuh. Mohon Pak, Bapak bisa menyakinkan kami Komis IV. Kami berharap juga Bapak bisa menyakinkan Bapak Presiden dan Pemerintah.

Terima kasih Pak Menteri.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Pak Ketua, Pak Ketua.

Setengah menit saja.

KETUA RAPAT:

Setengah menit.

Silakan Pak.

F-PDIP (Ir. MINDO SIANIPAR):

Jadi didalam kesimpulan nanti ada 1 butir ada 1 point yang kata-katanya demikian. Karena Rapat Kerja ini adalah Rapat Kerja antara legislative dan eksekutif. Rapat Kerja wakil rakyat dengan Presiden. Karena Presiden tidak bisa hadir disegala tempat, Presiden diwakili oleh pembantunya. Pembantunya itu Menteri. Sekjen engga masuk, Dirjen engga masuk. Hanya Menteri. Karena itu Rapat Kerja hanya dengan Menteri kita. Enggak boleh diwakilkan Menterinya. Jadi butirnya itu adalah Komisi IV DPR RI sepakat dengan Pemerintah c.q. Menteri Pertanian Republik Indonesia menolak importasi beras yang direncanakan 1 juta ton. Itu yang dimasukan. Tidak perlu yang lain-lain. Saya kira menyakinkan kita keyakinannya kita buat didalam kesimpulan nanti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih senior Pak Mindo.

Kami lanjutkan.

Berikut kepada juru bicara Fraksi PKS Bapak Andi Akmal Pasluddin.

Waktu dan tempat kami persilakan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV, Pak Menteri Pertanian beserta dengan jajaran, Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajaran, Bapak/Ibu sekalian yang berbahagia.

Yang pertama Pak Ketua dan disampaikan bahwa Fraksi PKS sangat menolak rencana impor beras 1 juta ton. Saya kira kita sudah tolak dari RDP kemarin, dan pada saat ini sepakat dengan Pak Mindo bahwa kita jadikan sebagai kesimpulan. Karena kami menilai bahwa ini kontradiktif dan mengada-ngada sebenarnya. Alasan Menko Perekonomian dan Mendag itu tidak bisa kita terima secara *argumentative*. Karena kalau kita lihat dari data yang ada, data BPS, data stok, kemudian data ramalan produksi ya kita surplus.

Jadi saya kira tidak ada alasan Pak. Kecuali kalau mau memakmurkan petaninya negara lain ya silakan impor. Tapi petani dalam negeri menderita. Ya saya kira kita juga harus berikan apresiasi terhadap petani dan Kementerian Pertanian yang sudah menjamin bahwa sebenarnya pasokan ada. Data yang ada itu saya kira itu tidak perlu kita perdebatkan Pak. BPS ini kan sebagai lembaga independent ya dan punya ramalan, punya data bahwa kita surplus beras. Jadi saya kira ini yang perlu dan saya tidak melihat disini Pak Menteri Pertanian melihat argumentasi atau mungkin suara keras dari Kementan.

Nah ini yang menjadi pertanyaan Komisi IV, kenapa cuma Bulog yang keras bicaranya. Impor 2 juta ton pada periode kemarin. Pak Budi kita masih sama-sama Komisi IV, kita tolak Pak 2 juta ton dipaksakan. Sekarang membusuk itu beras. Iya kan? Cadangan beras Pemerintah hampir 1 juta ton sekarang alasannya kan. Kemudian rusak sekitar 150 juta ton. Ini siapa yang menanggung, rakyat ini semuanya. Kita sebagai Wakil Rakyat Pak pasti kita bertahan bahwa kepentingannya petani kita utamakan. Bukan kepentingan yang lainnya. Itu yang pertama.

Jadi saya berharap Pak Menteri program AWR ataupun konstra tani, penguatan BPP, mungkin perlu dijelaskan kepada kami bagaimana maksimalisasinya. Karena supaya dengan harapan bukan hanya nanti BPS yang punya data Pak data yang langsung tapi Kementan juga punya data dan data itu bisa disajikan kepada Komisi IV bahwa di Provinsi ini sudah panen berapa kira-kira yang sudah masuk Pak ya. Saya kira penting Pak. Saya kira ini penting kita tahu karena AWR itu kan sangat gembar-gembor dulunya ya

dan anggarannya cukup besar. Nah bagaimana sekarang hasilnya. Itu yang pertama Pak Ketua mengenai dari Kementerian Pertanian.

Yang kedua mengenai serapan gabah. Akibat pernyataan sembrono dari Pejabat Pemerintah ya saya katakan Mendag dan Menko Perekonomian menyebabkan harga menjadi turun. Harga gabah dibawah HPP. Ini saya kira Menteri Pertanian sudah cukup bagus rencana Bapak ini untuk membantu. Sebenarnya bukan tugas Bapak sebenarnya disini. Jadi sebenarnya tugasnya Bulog dan Kemendag. Cuma selama ini kan Bulog dilemahkan. Bulog ini tidak punya dana, bagaimana mereka bisa menyerap gabahnya petani pada saat panen raya kalau tidak ada dananya. Saya kira Pak Jokowi perlu mendengar ini bahwa dilemahkan selama ini Ketua. Tidak diberikan dana tapi diberikan tugas yang sangat besar, teoritis, sangat bagus tapi enggak bisa dilaksanakan karena tidak ada dananya. Ini cerita semuanya kalau tidak ada langkah aksi dari Presiden saya kira sebagai. Harusnya Pak Presiden sebagai komandannya pangan nasional.

Jadi Pak Menteri, saya berharap penguatan ini Bulog saya kira agak susah juga kita paksa Bulog ini karena masalahnya banyak. Tapi mungkin perlu kita kuatkan dengan Satgas pangan juga Pak. Ya satgas pangan dengan kepolisian. Saya melihat selama ini Kementerian Pertanian belum aktif ya, belum terlalu aktif didalam satgas pangan ini sehingga mafia-mafia pangan ini masih banyak yang bermain untuk menyimpan stoknya sehingga harga naik atau rantai pangan ini tidak terjamin dengan baik. Saya berharap 2 hal ini Pak Menteri Pertanian yang perlu menjadi atensi kita. Dan saya yakin kerja Bapak selama ini sudah cukup bagus dan saya kira harus bersinergi dan memastikan bahwa kita punya kepercayaan diri untuk mampu menghasilkan pangan dinegeri kita sendiri terutama beras.

Yang kedua kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai masalah impor garam Pak. Ini juga Pak Menteri yang baru saya jelaskan bahwa memang dulu ada kebijakan bahwa impor itu harus persetujuan dari Menteri Teknis Pak. Tapi ini dicabut ini, ini. Sekarang hanya Rakortas, Menko yang memutuskan akhirnya jalan itu kebijakan. Tidak ditanya berapa produksi dari Menteri Teknis. Ini semuanya menurut saya menjadi penyebab carut marutnya impor di negeri kita. Karena Rakortas ini berkuasa. Dia tidak perlu persetujuan dari Menteri Teknis. Pak Menteri Pertanian mungkin enggak mendengarkan pendapatnya dari Menteri Pertanian berapa sebenarnya beras kita atau dari Menteri Kelautan ini sebenarnya garam kita ini berapa. Ya Pak ya? jadi saya kira carut-marutnya disitu Pak masalahnya. Yang namanya Menko kan enggak paham teknis tapi ya sok paham juga, akhirnya terjadi seperti ini.

Nah oleh karena itu kita ingin mendengarkan pemaparan dari Menteri Kelautan dan Perikanan apa langkah-langkah Bapak ini untuk mengurangi impor karena kita menuntut Bapak di hulunya Pak untuk memastikan bahwa garam rakyat kita jumlahnya cukup dan kualitasnya juga bagus. Alasan selama ini kan kualitasnya jelek. Kalau kualitas jelek diperbaiki dong. Itu tugasnya Pemerintah. Pemerintah kita kasih APBN kok, kita kasih orang, kita kasih aturan, ya kenapa enggak bisa selesaikan masalahnya rakyat kita. Ya

Pak Menteri ya. Jadi saya kira Pak Menteri KKP yang baru ini fokus Pak ke garam kita ini, kasihan ini petani garam kita ini Pak. Yang harganya dibawah HPP karena akibat impor yang sangat besar. Kemudian yang kedua, siapa yang menjamin Pak bahwa garam impor itu tidak merembes ke pasaran. Tidak ada yang bisa menjamin. Katanya untuk industri-industri. Tapi kita tidak bisa menjamin bahwa itu merembes ke pasar rakyat. Akhirnya garam rakyat tidak tertampung oleh pasar Pak. Saya kira menjadi komitmen kita Pak Menteri. Kita punya harapan bersama DPR dan Pemerintah, bagaimana kita bisa membantu rakyat kita.

Saya kira demikian Pak Pimpinan pandangan dari Fraksi PKS, dan mungkin dari Kapoksi lain bisa menambahkan.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Tadi Pak Andi sempat mengungkapkan impor beras Tahun 2018 ya Pak Andi ya. Itu sampai hari ini Bapak-Bapak masih tersisa kalau tidak salah 275.000.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

600.000 ribu ton Pak Ketua. Yang rusak 160.000 ton.

KETUA RAPAT:

Dan ada 106.000 yang terancam turun mutu. Ini data dari Bulog ini. Mohon kalau saya salah dikoreksi. Tapi ini catatan Bapak-Bapak. Tadi Pak Andi saya ingat itu tahun 2018 kita masih bersama-sama di Komisi IV dan kita menolak dengan tegas.

Terima kasih Pak Andi Akmal Pasluddin.

Berikutnya kami berikan kesempatan.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Pak Ketua, saya ada tambahan dari Fraksi PKS.

KETUA RAPAT:

Maaf Bu, bagaimana?

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Ada tambahan dari Fraksi PKS.

KETUA RAPAT:

Ibu saya kasih 1 menit Bu ya. Karena kita juru bicara fraksi dulu Bu. Baru nanti kalau ada pendalaman biasanya kita kasih waktu lagi. Tapi enggak apa-apa.

Silakan Ibu.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Iya ini kebetulan baru juga ini.

Terima kasih.

Bismilahirrahmanirrahim.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri Pertanian, beserta jajaran yang saya hormati,
Pak Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajaran yang saya hormati.

Ini pertemuan pertama yang baru saya ikuti Pak Ketua. Jadi mungkin minta waktunya juga untuk mendalami beberapa hal. Meskipun beberapa hari ini memang kita lagi membahas soal ketersediaan pangan untuk menjamin stok di pasar tersedia untuk kebutuhan puasa dan idul fitri.

Nah beberapa hal yang sering mengemuka Pak Menteri adalah ketika bulan Ramadhan dan Idul Fitri itu tiba sering terjadi kekosongan di pasar. Nah ini dari tahun ke tahun seperti terjadi semacam trend. Padahal luasan wilayah Indonesia sangat luas terbentang dari Aceh sampai ke Papua, berapa sih luas lahan-lahan kita? Kemarin pada saat pembahasan TP bersama dengan para Sekjen di rapat kemarin itu. Kami juga mengkritisi soal di Undang-Undang Cipta Kera ya misalnya di Pasal 31 itu terkait revisi Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian yang berkelanjutan. Disitu disebutkan bahwa jika ada proyek strategis nasional di salah satu lahan maka Pemerintah tidak wajib menggantikan lahan penggantinya. Pertanyaannya, bagaimana Pemerintah melindungi lahan pertanian ditengah laju alih fungsi lahan yang tinggi, kemudian produksi pertanian yang terus menurun, dan impor yang semakin tinggi. Padahal jika ada satu proyek strategi nasional itu lahan yang diambil itu bukan sedikit Pak, sangat besar sekali.

Nah yang kedua ini soal impor yang memang hari ini menjadi suatu informasi yang viral ditengah-tengah masyarakat. Kami melihat memang harus ada 1 informasi yang terbuka dan transparan di Kementerian Pertanian itu sendiri Pak Menteri. Dan juga harus ada upaya-upaya koordinatif lintas Kementerian. Jadi kalau hari ini ada Kementerian Menko, Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa siap untuk impor untuk 1 juta ton beras. Sementara yang tadi Bapak sampaikan bahwa kuota ketersediaan pangan kita surplus, lebih. Nah ini pertanyaannya bagaimana data. Jangan-jangan data ini tidak sampai ke Pemerintah. Nah lalu apa logikanya Pemerintah

kemudian mengambil keputusan untuk harus melakukan impor. Bagaimana dengan nasib petani-petani kita. Ini sangat melukai dan juga akan memiskinkan petani, padahal upaya kita bagaimana sektor rill, bagaimana kesejahteraan keadilan kepada petani itu juga bisa dilakukan.

Yang ketiga soal perikanan Pak. Saya singgung sedikit soal perikanan bahwa daerah-daerah kawasan di Timur Indonesia dan juga Maluku itu adalah daerah-daerah yang potensial sangat besar sekali untuk daerah-daerah penghasil ikan dan budidaya lainnya Pak Menteri dengan kapasitas dan latar belakang Bapak tadi saya tertarik dengan apa yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada trend pasar yang hari ini berubah dari data. Misalnya tadi Pak Ketua sampaikan bahwa kebutuhan akan kita kurang karena masalah ombak dan lain-lain sebagainya. Tapi saya juga perlu mengkonfirmasi terkait dengan potensi kawasan. Bahwa jika hari ini orientasi kita itu hanya ada pada kawasan tangkap saja lalu meniadakan atau tidak memacu berpacu kepada kawasan budidaya saya rasa itu perlu diperhitungkan dipertanyakan lagi Pak. Karena kawasan budidaya kita yang sangat luas sebenarnya. Saya ambil contoh di data DKP Maluku Pak. Di DKP Maluku itu mencapai 183 juta hektar yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota, belum lagi kawasan-kawasan di Indonesia Timur lainnya.

Nah saat ini masih pemanfaatannya itu baru mencapai 4,12% Pak Menteri. Nah berdasarkan data ini bahwa capaian realisasi produksi perikanan budidaya yang tahun-tahun sebelumnya di Tahun 2019 misalnya, baru dikelola hanya sebesar 620.000 ton atau 52% dari target yang mestinya ditetapkan oleh Pemerintah itu 1 juta sekian ton.

Nah ada 1 hal yang mungkin saya memberikan catatan Pak Menteri bahwa masyarakat kita yang hidup diwilayah Pesisir, diwilayah-wilayah area-area perikanan ini memang harus ada semacam treatment Pak. Harus ada edukasi, karakter buildingnya. Bagaimana agar dibangun karakter untuk mengelola sektor perikanan ini baik yang tangkap maupun budidaya, terutama budidaya Pak. Ini mungkin Dirjen Teknis terkait harus lebih mendalami lagi.

Nah jika kita masih tertumpu pada perikanan tangkap maka nanti alasan kita seperti itu, ada kondisi alam, kondisi kurangnya sarana dan prasarana, dan lain-lain sebagainya. Sementara untuk mengelola areal budidaya ini kita memang membutuhkan skill yang cukup, kemudian kesabaran, disiplin, dan proses pemeliharaan dari mulai penyebaran benih hingga panen. Nah ini yang mungkin saya juga perlu mendengar ataupun nanti ada jawaban tertulis bagaimana nih kabarnya lumbung ikan nasional Pak Menteri. Karena dia akan satu peta jalan besar untuk produksi perikanan baik itu di Maluku, Maluku Utara, Papua dan kawasan pesisir dan juga untuk kebutuhan ikan skala nasional Pak Menteri. Itu dari saya Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'allaikumsalam.

Terima kasih Bu Saadiah.

Berikut juru bicara dari Fraksi Partai Demokrat, Pak Suhardi Duka.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pak Menteri Pertanian, Menteri Perikanan, jajaran Eselon I,
Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat.

Saya langsung bertanya saja. Pertanyaan saya, sejauhmana Pak Menteri Pertanian memiliki kewenangan untuk mengontrol seorang atau importir memasukan barangnya di Indonesia. Begini, kan setiap bulan puasa itu barang sering naik. Kalau yang dalam negeri amanlah sebagaimana tadi Pak Menteri sampaikan. Yang tidak bisa kita penuhi dalam negeri kita sepakat impor seperti gula, kedelai. Kalau produsen gula di Indonesia dengan importir bersekongkol untuk memperlambat 2 minggu saja masuk gula di Indonesia, harga itu langsung naik. Terjadi inflasi. Terjadi inflasi, yang menikmati adalah importir, dan yang menikmati adalah produk luar negeri. Sedangkan yang selalu ditekan dengan inflasi adalah pangan nasional. Ini yang menjadi paradok selalu. Kita ingin menjaga inflasi tapi selalu fokus pada produk pangan. Pada saat produk pangan maka petani kita hancur. Di lain sisi inflasi bukan hanya produk pangan yang menyebabkan. Banyak produk elektronik, dan banyak produk yang lain. Seperti juga pakaian. Pada saat bulan puasa itu menyebabkan inflasi. Tapi Menteri Keuangan selalu menekan produk-produk pangan supaya jangan naik. Mungkin juga strateginya kemarin itu langsung mengumumkan bahwa akan terjadi impor beras 1 juta ton. Harga gabah lagi turun supaya inflasi ditekan. Ini juga menjadi persoalan.

Selanjutnya Pak Menteri Pertanian, saya kira data Menteri Pertanian dengan BPS sama kok enggak beda. Dan tentu kami Komisi IV percaya itu. Hanya tinggal bagaimana kemampuan Pak Menteri menyakinkan Presiden terhadap data produk pangan kita supaya jangan ada lagi kebijakan impor. Karena semua kita sepakat disini tidak menyetujui impor 1 juta ton beras itu. Dan akan kalau dilakukan akan menjadi disposal lagi.

Yang selanjutnya Pak Menteri KKP. Kita syukur karena kita mampu memenuhi dalam negeri produk kita. Dan Bapak juga menyampaikan ketersediaan bahkan surplus dalam menghadapi Bulan Ramadhan. Pertanyaannya adalah surplus atau ketersediaan ini apa memang sepenuhnya ketersediaan produk dalam negeri. Saya melihat bahwa terlalu mudah orang mengimpor produk hasil laut. Di satu sisi hasil laut kita banyak, proteksi dari negara-negara dengan alasan berbagai cara. Katakanlah salmon. Salmon di Indonesia merajalela, bukan hanya dihotel-hotel. Hampir

seluruh Provinsi ini salmon yang merajai. Bukan lagi ikan produk dalam negeri. Itu akibat karena terlalu mudahnya syarat impor masuk. Bahkan tadi Pak Ketua mengatakan bukan hanya jahenya tapi tanahnya juga yang di impor karena mudahnya. Disatu sisi banyak hambatan ekspor kita yang tidak mampu kita selesaikan baik bilateral maupun di WTO.

Jadi ini barangkali kerja-kerja keras kita sehingga kalau bisa itu impor perbanyaklah apa salahnya, perbanyak hambatannya. Kemudian ekspor permudah. Saya sependapat dengan Pak Presiden mengatakan “mari kita benci produk asing”. Bagaimana implementasikan amanat Presiden itu kepada 2 Menteri yang menjadi mitra kita ini.

Selanjutnya saya ingin sampaikan kepada Pak Menteri. Kalau kita hanya selalu menjaga laut, memperbaiki keamanan laut, Bakamla dan lain sebagainya. Kita jaga terus. Kapan kita tarik hasil laut kita untuk kita ekspor. Sekarang ini banyak uang kita, banyak biaya kita untuk menjaga laut kita dengan berbagai cara. Kita jaga terus bagaimana kita mau jaga ... ikan dilaut. Akibatnya juga dicuri oleh orang lain. Yang saya ingin adalah bagaimana cara kita memproduksi menangkap ikan itu. Jangan hanya di luat kita, kalau perlu dilaut orang juga kalau perlu kita tangkap. Selama ini kita menjaga ikan kita. Apa itu dijaga terus, tangkap itu ikan baru kita ekspor.

Dengan demikian banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Peraturan-peraturan itu selalu yang menghalangi petani kita. Baiklah, peraturan itu dihalangi nelayan negara asing. Sekarang ini peraturan-peraturan KKP justru menyebabkan terhambatnya produksi. Karena yang dipersyaratkan begitu besar adalah para nelayan kita. Saya ingin Pak Menteri focus pada kemampuan SDM nelayan kita. Kalau dia tidak focus susah juga. Olehnya itu anggaran Kementerian KKP tolong bisa sebagian dipeningkatan sumber daya manusia nelayan kita. Kementerian Pertanian kami sudah kerjasama dalam rangka peningkatan petani kita dengan berbagai macam Bimtek.

Yang kedua sarana produksi untuk para nelayan. Ada nelayan kelas atas tidak usah ditagih sarana produksi lagi. Kelas menengah cukup dikasih kredit. Malah yang kecil harus disiapkan mereka. Kalau Bapak tidak siapkan ini mereka tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Yang ketiga adalah bagaimana pasar dikelola dengan baik. Karena kalau pasar juga tidak bagus saya yakin petani kita juga tidak menikmati. Untuk Bulan Ramadhan saya kira cukup ikan, cukup udang, cukup kepiting. Saya kira ini cukup tiga, cumi-cumi juga barangkali.

Terima kasih.

*Wauallahumafiq Ila Aqwamith Thoriq,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Suhardi Duka.

Tadi karena kami sudah memberikan kesempatan tambahan kepada Partai Gerindra juga PKS, saya rasa kita ada pendalaman dari partai-partai kami persilakan. Jadi kalau ada tambahan dari Fraksi Partai Demokrat.

Pak Muslim silakan Pak.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pak Ketua, dan Wakil Ketua Komisi IV, Pak Menteri KKP, Menteri Pertanian.

Saya ingin tambahkan yang disampaikan Pak Suhardi nih. Pertama khusus buat Pak Menteri Pertanian nih. Tentu kita terima kasih kemarin dengan program-program yang sudah cukup bagus termasuk pemberdayaan dalam bidang SDM, kemudian ada juga dari Saya pikir sangat positif Pak Menteri. Cuma tentu yang menjadi sorotan kita persoalan impor lagi. Jadi terus terang sangat dikeluhkan oleh masyarakat menghadapi daerah ini disaat produksi membanjir malah impor masuk. Jadi sehingga harga gabah di petani ini sangat terasa terpukul.

Yang kedua Pak Menteri khususnya Kementerian Pertanian ini. Saya berharap ini kerang ekspor ini juga diberikan ruang gerak kepada daerah. Terus terang di daerah ini sangat terbatas. Kita berharap juga dari Kementerian Pertanian dalam hal ini juga, ada bentuk pembinaan atau memberikan solusi khususnya kepada kerang impor ini misalnya seperti di Aceh Pak Menteri. Disana kita tahu betul produksi yang terbesar salah satu itu komoditinya pinang, kemudian juga ada pala. Selama ini terus terang petani ini sangat sulit untuk pasar ini. Sehingga mereka kebanyakan mereka harus menjual ke tengkulak-tengkulak yang ada di Sumatera Utara.

Nah ini kita berharap juga Kementerian Pertanian juga ikut ambil andil dalam konteks ikut memberikan ruang gerak kepada masyarakat. Jadi sehingga disamping diberikan pupuk juga pasarnya di beri ruang gerak, ya Pak Sekjen ya. Ini kemarin bertemu dengan beberapa petani di Aceh khususnya Aceh Selatan itu mereka berharap juga dukungan pala Pak. Kemudian dari Kementerian Pertanian kemarin sudah dialokasikan pinang. Kenapa? Salah satu ekspor terbesar di Aceh itu pinang Pak, kemudian pala. Tapi mereka masih barang mentah Pak. Harus kadang-kadang dibawa ke Medan dulu. Di produksi di Medan. Jadi sehingga petani itu sangat kecil pendapatannya. Jadi kita minta dukungan juga mesin-mesin produksi daripada Kementerian Pertanian. Jadi sehingga petani di Aceh juga mereka bisa mengelola sendiri sehingga hasil yang mereka dapatkan bisa maksimum.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Menteri KKP. Terus terang Pak Wahyu Trenggono ini semangat Bapak luar biasa. Kita tentu memberikan spirit yang termasuk juga dalam konteks PNBK. Total-total dan kemarin hanya 500 sekian Miliar. Sekarang target sekitar 12 Triliun. Artinya apa? Ini ada satu cerca harapan di sector perikanan. Tentu dalam hal ini Pak, ini yang kita kunjungi di beberapa TPI di seluruh Indonesia. Kemarin juga kunjungi ke Aceh di pimpin oleh Kang Dedi. Ini masyarakat juga berharap ada dukungan. Kalau pun enggak ada dukungan Pemerintah dibuka akses kepada pengusaha Pak. Di Aceh hampir seluruh TPI-TPI Pak mereka belum punya kapal satu pun yang punya tempat gudang beku.

Jadi sehingga kualitas daripada ikan-ikan yang mereka dapatkan ini tidak maksimum Pak Menteri. Termasuk di beberapa Pelabuhan ini mereka mengeluhkan, kalau bisa kalau toh mereka termasuk juga bantuan modal. Saya lihat ada BLU ya di Kementerian KKP. Ini mudah-mudahan juga bisa diberi ruang gerak kepada mereka.

Jadi sehingga juga bisa mereka mendapatkan khusus berkaitan fasilitas kapal beku Pak. Kalau ini bisa diberikan saya yakin ini tingkat ekspor akan naik Pak. Di Aceh baru 1 pengusaha Pak yang bisa ekspor langsung ke Jepang ya. Jadi kita harapkan nanti di beberapa Pelabuhan juga diberikan ruang gerak. Sehingga pengusaha-pengusaha muda yang tadi mungkin satu perusahaan, kedepan mungkin dengan ada Pak Menteri baru kita harapkan bisa juga 3, 4, bahkan 10 perusahaan. Jadi sehingga pemberdayaan masyarakat dapat. Pendapatan Daerah juga bisa dapat termasuk juga pendapatan nasional juga bisa maksimum.

Kemudian yang terakhir kita berharap fasilitas juga Pak Menteri, termasuk juga berkaitan dengan pabrik es. Ini juga akan dibutuhkan beberapa titik. Jadi sehingga nanti program-program Kementerian KKP ini kita harapkan juga bisa langsung detiknya kepada masyarakat.

Mungkin itu Pak Ketua beberapa hal yang saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Muslim, tambahan dari Fraksi Partai Demokrat.

Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bu Julie Sutrisno. Juru bicara dari Fraksi Partai Nasdem.

Silakan Bu Julie.

F-NasDem (JULIE SUTRISNO):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dengan Anggota Komisi IV,
Yang saya hormati, saya kasihi kedua Pak Menteri.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pada rapat kali ini Fraksi Partai Nasdem akan mencermati beberapa hal diantaranya 2 untuk Menteri Pertanian, 2 untuk KKP.

Untuk Menteri Pertanian, Fraksi Partai Nasdem menyatakan menolak rencana impor beras oleh Pemerintah. Kami meminta Kementerian Pertanian menjamin bahwa produksi beras dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan beras nasional. Kami mendorong untuk mengutamakan penyerapan hasil panen petani dengan harga yang baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga semangat petani Indonesia untuk terus memproduksi.

Yang kedua, dari data prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok strategis nasional yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian. Terdapat setidaknya 4 komoditas yang pemenuhan kebutuhan melalui impor yaitu kedelai, bawang putih, daging sapi, kerbau dan gula pasir. Sebagai upaya jangan pendek menghadapi bulan Ramadhan percepatan impor 4 komoditas tersebut memang diperlukan untuk jaminan ketersediaan kebutuhan. Namun scenario jangka menengah dan jangka panjangnya juga perlu perhatian lebih lanjut. Berdasarkan data yang disajikan perkiraan ketersediaan yang bersumber dari produksi dalam negeri terhadap perkiraan 4 komoditas tersebut masih sangat rendah. Fraksi Partai Nasdem memahami bahwa ketergantungan terhadap impor tidak bisa diakhiri seketika. Namun upaya tersebut harus dilakukan secara bertahap dengan mengoptimalkan peningkatan produksi dalam negeri dalam pemenuhan kebutuhan nasional terutama pada 4 komoditas tersebut.

Ini untuk Menteri KKP. Terkait pasokan ikan menghadap bulan Ramadhan, Fraksi Partai Nasdem meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memperhatikan kestabilan pasokan. Pada bulan Ramadhan permintaan biasanya mengalami peningkatan. Justru pada saat nelayan tidak melaut yaitu minggu pertama puasa dan saat lebaran, dan beberapa setelahnya. Untuk itu kami mendorong KKP melakukan antisipasi dengan mengoptimalkan produksi ikan budidaya untuk menjamin pasokan pada saat menurunnya produksi perikanan tangkap karena nelayan tidak melaut. Fraksi Partai NasDem mendorong penerapan *early warning system* terkait komoditas pertanian maupun perikanan yang sering mengalami lonjakan harga karena pasokan yang tidak stabil menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Dengan begitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat mengantisipasi dan menjaga kestabilan pasokan komoditas dengan memacu peningkatan produksi pemetaan dan percepatan distribusi komoditas dari daerah surplus ke daerah yang defisit. Serta perbaikan sistem menyimpan sehingga menambah masa simpan produk. Saya juga nanti sebentar akan lampirkan aspirasi dari teman-teman yang saya tidak bacakan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Julie.

Apakah ada tambahan dari Fraksi Nasdem?

F-NasDem (JULIE SUTRISNO):

Tidak Pak, karena saya sendiri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Julie.

Berikut kami beri kesempatan kepada juru bicara dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Pak Muhammad Syafrudin.

Waktu dan tempat kami persilakan.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi, kemudian Pak Menteri baik Pertanian dan Kelautan, Pak Dirjen yang saya hormati.

Pak Menteri,

Saya menyampaikan kepada Bapak-Bapak yang ada di Jakarta Pak Sekjen bahwa jika di Daerah itu mengajukan permohonan, misalnya untuk pergudangan atau apa, pengeringan atau apa itu mungkin bisa dikonsultasikan yang matang. Maksud saya, jangan sampai itu barang-barang jadi mangkrak. Semangatnya saja itu minta. Tetapi begitu ada itu barang-barangnya tidak bermanfaat maksimal. Minta lagi sama kita di Jakarta, minta terus. Saya monitor ada beberapa permintaan di Daerah Pemilihan saya. Saya menyampaikan saya bersyukur tetapi kalau bisa diverifikasi yang bagus supaya tidak jadi mangkrak. Sudah jadi nanti tidak diurus. Ganti Kepala Dinas lain lagi kebijakan itu.

Masalah impor beras, kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Kita tahu beberapa hari ini kita mendengarkan keluhan petani-petani kecil. Pak tolonglah jangan terlalu diimpor, harga kami jadinya kecil. Jadi beberapa

Fraksi juga menolak agar itu ditolak. Saya mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan kepada Pemerintah dengan ketulusan hati agar ditinjau kembali. Dan jangan terlalu di bombardier berlebihan gitu loh. Petani di Indonesia ini Menko apa segala. Jadi disudutkan dengan opini. Saya kira ada Bapak-Bapak Menteri yang bisa mengcounter itu. Sehingga ketika rapat dengan Pak Menko itu ya dikaji yang rapih itu supaya kelihatan manajemen yang bagus ke Pemerintahan Indonesia ini.

Pak Menteri, Pak Dirjen dan yang lain-lain.

Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Menteri Pertanian ketika rapat dengan Pak Sekjen. Di Nusa Tenggara Barat khususnya dari Pulau Sumbawa yaitu di Labangka, Bapak-Bapak menjanjikan *Food Estate* kecil-kecil walaupun ada di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, dan Bapak-Bapak sudah membantu 200 ekor sapi. Sekarang itu Pemerintah tidak bisa melanjutkan pembangunannya. Nah ini saya baru omongin tadi. Tidak bisa melanjutkan pembangunannya oleh karenanya Pemerintah kalau diijinkan, kalau dibolehkan atau tidak menyalahi prosedur didefinisikan. Sehingga PUPR dan BWS itu bisa melanjutkan pembangunannya Pak Menteri. Kalau tidak, ya hanya itu saja kan hanya ada sapi. Selanjutnya tidak akan bisa dilanjutkan pembangunannya karena nanti akan jadi temuan. Ini saya sampaikan kepada Pak Menteri Pertanian. Dan ini yang ringan saja buat Menteri Pertanian, tolong dikasih tahu Pak Wamennya kalau jalan-jalan kasih tahu kita juga. Kemarin ke kampung saya enggak ngomong juga. Jadi tolong kasih tahu. Ini yang ringan saja untuk catatan saja. Mudah-mudahan tidak salah lagi. Kalau Pak Menterinya okelah. Wamennya mungkin belum ketemu saya.

Selanjutnya Pak Trenggono yang terhormat masalah garam. Mohon kiranya dibantu. Kalau memang garam itu tidak maksimal karena alasannya tidak bagus sehingga ada statement juga akan diimpor 3 juta ton. Ya Pak Menteri mungkin belum berkunjung juga di Nusa Tenggara Barat khususnya di Daerah Pemilihan saya. Jadi wajar kalau salah-salah sedikit. Jadi mungkin Madura dan salah satu di Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Pemilihan saya di Bima itu sangat banyak sekali garam. Mungkin bisa dimaksimalkan sehingga produknya bagus. Saya tahu Bapak-Bapak punya teknisi dan punya kemampuan yang sangat luar biasa untuk ... sehingga petani merasa happy. Harganya oke, dan punya kualitas yang sangat bagus. Nah ini yang saya sampaikan pada Bapak-Bapak sekalian. Sekali lagi untuk impor beras dan impor garam, kami dari Fraksi Amanat Nasional menolak keinginan tersebut dan bisa ditinjau kembali oleh jajaran Pak Menteri.

Terima kasih.

*Billahi Fi Sabililhaq Fastabiqul Khaerat,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pimpinan, saya ini bingung. Wamen ini dilantik beberapa bulan? Hampir 3 bulan tapi kok enggak pernah kok ikut Rapat Kerja di Komisi IV. Atau ada penugasan khusus supaya jangan datang ke Komisi IV atau memang enggak mau datang ke Komisi IV. Tolong nanti Sekjen sampaikan. Ini kata saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Berikutnya juru bicara dari Fraksi PPP, Ibu Ema Chusnah.

Silakan Bu Ema.

F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan, dan Bapak/Ibu Anggota Komisi IV yang kami hormati, Pak Menteri Pertanian beserta jajaran, Bapak Menteri KKP beserta jajaran yang juga kami hormati.

Salam sehat semuanya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wata'ala. Aamiin.

Yang pertama terkait saran dan pertanyaan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Yang pertama kita sama Pak, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi yang lain, rencana impor beras. Yang akan dilakukan Pemerintah saat ini benar-benar tidak tepat. Karena memang kebutuhan beras dalam negeri saat ini masih mencukupi apalagi bulan Maret sampai April adalah musim panen raya di berbagai daerah di Indonesia. Kami Fraksi PPP menolak impor beras karena tidak ada urgensinya. Kami meminta Pemerintah membuka data stok dan kebutuhan publik agar publik bisa menilai apakah memang betul impor atau tidak, dan Pemerintah bisa transparan mengambil kebijakan. Ini permohonan dari Fraksi PPP Pak Menteri.

Yang kedua, masa pandemi masih terus berlangsung namun kami menilai para petani semakin susah karena dihadapkan pada permasalahan sulitnya memperoleh pupuk subsidi, tingginya biaya produksi, dan turunnya harga gabah. Seharusnya Pemerintah bisa hadir mengurangi beban petani. Namun yang terjadi Pemerintah melakukan hal sebaliknya. Hal ini dilihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah. Semakin rajin mendatangkan produk-produk impor membuat para petani semakin tidak berdaya. Sepanjang Januari-September 2020 Pemerintah telah melakukan impor gandum, impor kedelai, impor jagung, bahkan akhir-akhir ini impor singkong sebanyak 136.000 ton. Kebijakan-kebijakan ini justru membuat para petani semakin terpuruk dan semakin termarginalkan. Mohon pencerahan Pak Menteri.

Yang ketiga, ini kepada Pak Menteri KKP mengenai persoalan garam. Lagi-lagi impor garam Pak. Kami Fraksi PPP mendorong penguatan anggaran di KKP kedepan sebagai upaya untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam local sesuai standar mutu industri. Selama kita belum bisa memenuhi produksi sendiri untuk kebutuhan garam industri. Kami meminta Pemerintah memperketat pengawasan agar tidak terjadi kebocoran garam industri masuk ke pasar dan menyaingi garam konsumsi rumah tangga. Selain itu kami berharap Pemerintah bisa terus menyiapkan teknologi dan melakukan pendampingan kepada petani garam agar mampu memproduksi garam dengan standar kualitas kebutuhan industri. Dan diperlukan gerakan sosialisasi atau kampanye kepada masyarakat, terutama kepada Ibu-Ibu Rumah Tangga melalui Majelis-Majelis Ta'lim, melalui PKK atau organisasi perempuan supaya Ibu-Ibu yang menggunakan garam akan senantiasa cinta garam dalam negeri, agar tidak kalah branding dengan garam impor. Jadi ini juga upaya untuk bagaimana masyarakat kita juga menggunakan garam produk dalam negeri.

Terakhir, terkait persiapan menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri. Kami meminta Pemerintah selain memastikan juga stok bahan pangan pokok, Pemerintah harus melakukan pengawasan secara optimal sehingga distribusi berjalan dengan baik untuk menghindari adanya oknum, pelaku bisnis yang berupaya melakukan penimbunan bahan pangan pokok sehingga menimbulkan kelangkaan. Kami meminta peran satgas pangan bekerja secara maksimal.

Terima kasih.

Itu yang bisa saya sampaikan.

Waulahumafiq illa Aqwamith Thoriq.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Ema.

Apakah ada tambahan dari Fraksi PPP?

F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):

Cuma satu Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Siap Bu Kapoksi.

Mohon maaf.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada juru bicara dari Fraksi Partai Golkar, Ibu Alien Mus. Oh maaf, Pak Firman Soebagyo. Maaf senior.

Silakan.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan yang saya hormati, dan
Seluruh Anggota Komisi IV yang berbahagia, dan
Pak Menteri Pertanian dan jajarannya yang saya hormati, dan
Menteri KKP yang diwakili oleh para Eselon I beserta jajarannya.

Pertama-tama tentunya kami menyampaikan terima kasih dan Alhamdulillah kami bisa bersama-sama kembali. ini karena saya habis COVID. Ini adalah ujian bagi saya, dan atas doa teman-teman dan akhirnya kita bisa bergabung lagi.

Pertama tentunya hari ini kita fokus kepada masalah kesediaan pangan menjelang lebaran sebagaimana yang disampaikan Pimpinan tadi. Tentunya kami akan mengawali seperti yang kami sampaikan kemarin dengan Pak Menteri Pertanian di Rapat Badan Registrasi pangan. Kalau boleh saya mencoba mengambil daripada petikan Pidato Bung Karno bahwa soal pangan adalah mati-hidupnya Bangsa.

Dan yang kedua adalah hak asasi manusia. Ini adalah dan kemudian ketika pangan harus tersedia oleh negara. Ini adalah mandatory daripada konstitusi. Oleh karena itu kalau kita bicara tentang keuangan dan (rekaman rusak) fraksi-fraksi yang ada di DPR, ini termasuk Fraksi Golkar dan Pemerintah tentunya termasuk Menko Perekonomian dan juga Kementerian-Kementerian lain. Itu yang tidak akan membela kepada kepentingan rakyat dan petani. Semuanya tapi rakyat Indonesia jumlahnya 270 juta penduduk Indonesia. Oleh karena itu kita bicara tentang masalah impor, saya akan sedikit mengutip daripada resume yang disampaikan oleh Perum Bulog yaitu ton terdiri dari beras GPP 859,877 ton, beras komersial 23.708 ton. Sebab tersebut untuk kebutuhan penjualan KPSA dan bencana sesuai dengan kebutuhan Bulog. Ini saya membacakan supaya masalah impor ini jangan saling menyalahkan diantara Pemerintah dan juga diantara kita. Karena ini adalah menjadi kewajiban kita bersama.

Dan yang kedua penyaluran beras JBP (jajaran beras Pemerintah) dari Januari 14 Maret 2001 sebesar 131.774 ton terdiri dari KPS 116.767 ton. Ini ditangan pemegang kunci adalah masyarakat termasuk pedagang.

Oleh karena itu juga ini tidak bisa diharapkan menjadi cadangan yang sifatnya absolut karena ini tergantung daripada pemegang dagangan, apakah dijual atau tidak nanti adalah menjadi tanggung jawab mereka. Kemudian tanggap darurat berjamaah 1031 dan kemudian golongan anggaran 13.976

ton. Realisasi pengadaan gabah beras dalam negeri Januari sampai dengan 14 Maret 2001 sebesar 70.940 ton terdiri CBP 37.806 ton, dan komersial 33.134 ton. Memasuki panen raya target penyerapan dalam negeri CBP bulan Maret-April 2001 sebesar 390.800 ton sehingga diharapkan. Saya ini menggarisbawahi diharapkan stok CBP diakhir April sudah diatas 1 juta ton.

Nah bicara tentang gabah ini, tadi saya katakan bahwa namanya ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga ini itu adalah ada di masyarakat. Nah diharapkan stok akhir April, ini kan masih belum dilakukan panen. Ini kan masih menjadi harapan. Nah realisasinya apakah betul atau tidak nanti sesuai dengan yang disampaikan oleh Bulog tadi.

Nah oleh karena itu kembali kepada masalah impor yang sekarang dilakukan ini saya lihat pertama, Pemerintah bersama BULOG harus betul-betul mengadakan evaluasi kembali. Berapa sesungguhnya stok-stok yang rusak dan kemudian stok yang mungkin nantinya kemudian tidak bisa dimanfaatkan karena kemarin pada waktu penjelasan dari Perum Bulog menyampaikan bahwa mereka juga membutuhkan beras-beras impor untuk campuran karena ada yang rusak.

Nah oleh karena itu impir ini sebetulnya adalah untuk kebutuhan cadangan pangan yang untuk masyarakat Indonesia yang jumlahnya 270 juta tadi. Dan kemudian koordinasi diantara Pemerintah ini tentunya kami sangat mengharapkan bahwa perlu adanya evaluasi dan klarifikasi kembali bersama Pemerintah, Pak Menko duduk bersama-sama sehingga Pemerintah itu bisa memberikan data dan kemudian juga bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang jumlah yang sesungguhnya.

Nah ini tentunya mengenai masalah impor tadi. Saya telah baca data dari Bulog ini, memang ada sesuatu yang masih belum bisa dipertanggungjawabkan adalah karena stok 1 juta ton itu masih menunggu panen bulan April padahal ini kami belum tahu apakah bulan April nanti itu betul-betul terealisasi seperti itu atau tidak. Nah kalau tidak maka ini problemnya adalah kembali kepada masalah pasar karena stok yang cukup besar tadi adalah ditangan masyarakat.

Jadi ini tentunya harus menjadi perhatian kita. Jadi kita tidak boleh berpegang kepada data sepihak tapi tentunya Pemerintah dalam hal ini pada waktu Pak Menko itu memutuskan tentunya ada juga masukan-masukan atau data-data yang disampaikan kepada Pak Menko Perekonomian sehingga diputuskan perlunya impor ini adalah untuk menjaga cadangan pangan nasional. Dan ini juga kemarin sudah disampaikan oleh Pak Mendag juga sama bahwa cadangan impor ini adalah untuk stok. Jangan sampai nanti pada saatnya itu ternyata harapan daripada stok pangan pada bulan April tidak tercapai sehingga masyarakat akan dihadapkan kepada defisit pangan. Nah ini satu hal tentang masalah yang terkait dengan impor.

Dan yang kedua terkait dengan masalah yang disampaikan Pak Ketua Pak Sudin. Fraksi Partai Golkar sepakat bahwa jahe campur tanah yang masuk ke Indonesia itu harus betul-betul segera dimusnahkan, atau

dikembalikan kepada negara asal. Karena didalam Undang-Undang Pangan itu higienis atau kualitas mutu harus terjamin. Artinya apa, kalau ada impor yang memang komoditinya itu tidak terjamin kualitasnya, higienisnya, kualitas mutunya ini melanggar Undang-Undang. Artinya ada konsekuensi hukum. Artinya bahwa ini ada konsekuensi hukum dan ada sanksi pidananya. Oleh karena itu kalau memang ini terjadi maka kita harus berani mengambil sikap untuk melakukan proses hukum kepada yang bersangkutan.

Dan yang terkait dengan masalah Undang-Undang Pangan yang disampaikan Pak Darori tentang WTO. Ini memang betul bahwa terjadi konsekuensi revisi dalam Undang-Undang di Cipta Kerja. Perlu kami ketahui bersama atau kami sampaikan bahwa didalam Sidang WTO Undang-Undang Pangan dan beberapa Undang-Undang lainnya telah digugat. Oleh karena itu ketika kami membahas di Badan Legislasi sebagai Panja Cipta Kerja telah mengundang Dirjen WTO untuk menjelaskan kebenaran ini. Dan memang disampaikan bahwa didalam amar keputusan salah satunya adalah untuk masalah ekspor impor itu tidak perlu ada pembatasan-pembatasan di negara-negara, di semua negara.

Namun tentunya kami sebagai pengambil keputusan politik bersama Pemerintah telah mengatur mensiasati tentang kesetaraan kemudian perlindungan petani, itu juga diatur disitu. Oleh karena itu di Undang-Undang Cipta Kerja itu semua mengatur. Kita tetap komit kepada perlindungan petani kita. Namun tentunya kami juga harus tunduk karena Sidang WTO telah memvonis bahwa Undang-Undang Pangan kita ini telah divonis bahwa itu harus direvisi, harus dibatalkan.

Nah namun kita tidak membatalkan tapi kita hanya merevisi terhadap pasal-pasal tertentu yang memang dijadikan vonis oleh WTO dan itu kami lakukan di Undang-Undang Cipta Kerja supaya kita tidak ada kesalahpahaman memahami terhadap Undang-Undang ini. Karena Undang-Undang ini adalah diputuskan antara DPR bersama Pemerintah, dan DPR ketika itu juga dihadirkan Fraksi-Fraksi semuanya dan sudah dijelaskan oleh Dirjen WTO, dan kemudian dijelaskan oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian terkait, semuanya yang menjelaskan tentang masalah ini. Jadi ini tentunya harus menjadi perhatian kita bersama yang terkait dengan masalah hiruk pikuknya impor ini agar kita tidak ada prasangka-prasangka yang diganti kepada Kementerian itu tentang masalah impor pangan ini.

Jadi itu Pimpinan yang tentunya kami menegaskan kembali tentang masalah data ini. Perlunya Pemerintah bersama Bulog melakukan koordinasi kembali karena data-data yang diekspose ini memang menjadi isu yang menarik di public sehingga seolah-olah ini ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dilakukan oleh Kementerian tertentu. Saya rasa tidak. Saya pikir semua Pejabat Pemerintah, dan kemudian kepentingan negara harus kita penuhi karena tadi ada mandatory daripada konstitusi bahwa pangan harus tersedia oleh negara sehingga kalau terjadi defisit maka yang disalahkan adalah Pemerintah, bukan yang disalahkan adalah Bulog.

Jadi ini tentunya klarifikasi kami. Dan mohon kiranya Pimpinan bisa lebih bijaksana nanti untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan, dan harapan kami kita bisa memahami apa yang akan dihadapi oleh Pemerintah saat ini.

Demikian.

Terima kasih.

Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Kapoksi.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Jadi saya agak kurang jelas mendengarnya karena suaranya agak kurang bagus. Intinya Pak Firman setuju impor beras. Begitu Pak?

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Begini, saya mungkin bisa menegaskan kembali bahwa impor itu sebuah keniscayaan karena memang diatur dalam Undang-Undang. Namun tentunya impor ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pangan. Bahwa impor tidak boleh dilakukan ketika stok pangan nasional itu memang masih tercukupi. Oleh karena itu tadi saya sampaikan dalam data yang disampaikan oleh Perum Bulog yang ada di tangan kami ketika rapat kemarin di Badan Legislasi bahwa cadangan pangan itu terbesar adalah di tangan masyarakat dan dipasar. Dan kemudian stok yang akan dilakukan Bulog itu adalah diharapkan stok CBB akhir April itu bisa itu diharapkan. Artinya bahwa ini belum terlaksana. Padahal negara atau Pemerintah itu harus menyediakan pangan yang ready setiap saat bilamana terjadi gagal panen. Itu penjelasan kami Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

(suara tidak jelas) nanti dalam kesimpulan rapat kami minta pendapatnya Pak Firman yang mewakili Fraksi Golkar supaya kami jangan dianggap Pimpinan dan Anggota yang hadir ini memutuskan kesimpulan tanpa mendengarkan Fraksi Golkar melalui Pak Firman.

Demikian.

Terima kasih Pak Firman.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Siap Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Apakah ada tambahan dari Fraksi Golkar?

Selanjutnya kami persilakan kepada juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan Pak Sutrisno.

Waktu dan tempat kami persilakan Pak Sutrisno.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pimpinan, Pak Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, beserta jajaran, teman-teman hadirin yang berbahagia.

Saya untuk focus pada akar persoalan dulu Pak Menteri yaitu evaluasi penyediaan pangan menghadapi Bulan Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan. Terutama tentunya Bulan Puasa. Bulan Puasa tinggal 1 bulan lagi. Dari pengalaman yang silam manakala kita tidak siap dengan stok pangan yang ada efeknya pada seluruh relung-relung kehidupan masyarakat. Nah oleh karena itu Pak Menteri, akar persoalannya adalah ada bagaimana ketersediaan stok dan bagaimana mendistribusikannya. Ketersediaan stok pangan tentunya sumbernya adalah dari produksi dalam negeri dan juga dari impor. Kemudian karena sekarang ini tinggal 1 bulan lagi. Pertanyaannya adalah sampai berapa jauh, karena wilayah kita ini sangat luas. Sangat sulit komunikasinya. Oleh karena itu pertanyaannya, sampai seberapa jauh penyediaan stok pangan menghadapi Bulan Ramadhan ini sudah tersebar kepada semua wilayah.

Kemudian yang kedua, sebagai acuan kita adalah neraca pangan yang kemarin pada Rapat tanggal 15 disampaikan oleh Pak Sekjen kepada Komisi IV ini. Itu adalah neraca pangan sampai dengan Bulan Mei, masuk pada lebaran bakal tahun ini. Dari data yang ada semuanya sangat kritis ini Pak Menteri. Baik dari sisi produksi maupun dari sisi impor. Sangat produksi karena dari stok diakhir tahun itu cabe yang besar, cabe keriting termasuk juga bawang merah ini tidak tersedia. Semua dalam proses produksi, proses penanaman. Begitu juga dari barang impor yang 4 komoditas strategis. Saya hitung itu rata-rata yang paling tinggi itu hanya gula pasir untuk 3 bulan yang lainnya dibawah 3 bulan. Pertanyaan saya adalah, apakah barang-barang ini aman adanya. Sebut saja dalam proses produksinya untuk barang-barang yang memang akan dihasilkan oleh kita sendiri. Yang kedua, untuk barang-barang yang akan sumbernya dari impor, bagaimana proses impornya. Mestinya barang-barang yang akan diandalkan dari impor itu harus sudah ada dinegeri kita ini. Harus sudah didistribusikan ke daerah-daerah. Kalau komunikasi sangat-sangat jauh. Begitu pula pada konteks daging. Yang dalam neraca pangan kita defisit. Ini pun juga sangat rawan. Ini semua titik-titik rawan semuanya. Oleh karena itu Pak Menteri perlu menjelaskan permasalahannya. Karena konteks kita pada hari ini adalah bagaimana kesediaan pangan menghadapi bulan suci Ramadhan dimana masyarakat kita mayoritas adalah umat muslim.

Kemudian yang ketiga, gonjang ganjing impor beras. Fraksi PDI-Perjuangan konsisten komitmen atas keputusan Rapat tanggal 15 Maret yang kemarin bahwa keputusan Komisi IV adalah minta untuk mencabut rencana impor beras itu. Namun sebelum Pemerintah keputusan, mengambil sikap gonjang ganjing semakin ribut, semakin tajam di publik. Oleh karena itu solusinya sesungguhnya ada di tangan Menteri Pertanian. Karena Menteri Pertanianlah yang tentunya melindungi dan petani itu adalah objek daripada garapannya Menteri Pertanian. Menteri Pertanian telah merilis tentang stok, surplus beras 12,5 juta ton. Dan tentu ini harus dipertanggungjawabkan. Rilis itu sebagaimana kemarin disampaikan oleh Dirjen Tanaman Pangan itu dihitung dengan stratanya dari Kabupaten/Kota. Artinya apa? Dari sisi metodologis statistic ini sangat rendah tingkat kekeliruannya. Jadi kalau tadi Pak Firman masih meragukan apakah benar prediksinya, saya sebagai almamater statistic menyakini prediksi itu juga akan menjadi kenyataan.

Oleh karena itu, Pak Menteri lah yang harus bisa menjelaskan kepada jajaran Menteri yang lainnya apalagi mungkin kepada Presiden. Manakala Pak Menteri respon sifatnya persoalan ini, ini persoalan akan semakin berkembang. Karena sudah masuk pada tatanan politik.

Kemudian yang kedua adalah bagaimana Pak Menteri mengamankan produksi pertanian dalam negeri. Tentunya khususnya beras ini. Supaya prediksi itu menjadi kenyataan. Saya menyakini tidak akan terjadi kekurangan beras di Tahun 2021 ini.

Kemudian yang terakhir kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, terkait dengan garam. Pak Menteri, saya hidup sejak Presiden pertama nih Pak. Jadi rakyat awalnya sebelum ada impor garam itu memang memanfaatkan garam rakyat. Tapi semakin dibuka ruang untuk bisa mengakses barang-barang luar negeri, rakyat kitalah yang tersisihkan. Petani garam adalah petani kecil yang hidupnya mencari hari ini untuk hari ini. Oleh karena itu mohon kebijakan dari Pak Menteri, minimal garam-garam rakyat itu diperuntukan konsumsi public. Yang kedua, agar Kementerian Kelautan dan Perikanan manakala memang masih harus mengimpor garam dibatasi saja untuk industri. Jangan masuk kepasar konsumen. Manakala ini dilakukan Inshaa Allah petani garam kita juga akan dibantu.

Saya kira itu saja dari saya. Teman lain silakan untuk menambahkan.

Demikian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sutrisno.

Apakah ada tambahan dari Fraksi PDI-Perjuangan?

Pak Ono Suro.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Yang saya hormati Pimpinan, kawan-kawan Anggota dan Pak Menteri Pertanian dan Kelautan Perikanan.

Terima kasih. Saya ingin menambahi. Yang pertama terkait dengan regulasi Pak. Hari ini kita diperhadapkan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada perubahan tentang regulasi yang menyangkut pengaturan impor pangan. Dahulu produksi dalam negeri dan cadangan ini lebih diutamakan untuk memasok kebutuhan pangan nasional. Tapi sekarang produksi dalam negeri, cadangan, dan impor. Nah tetapi tentunya di Pasal 36 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur masalah pangan bahwa untuk konsumsi dan cadangan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kepentingan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan UKM dibidang pangan.

Nah yang kedua di Cipta Kerja juga yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Dahulu berbunyi pasalnya mengutamakan produk pertanian dalam negeri. Yang diatur impor tersebut sesuai dengan musim panen dan kebutuhan konsumsi dalam negeri. Nah sekarang berubah Pak, kecukupan kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan melalui impor dengan tetap melindungi kepentingan petani yang sesuai dengan instrument perdagangan.

Nah ini aneh ini, instrument perdagangannya seperti apa nih. Sehingga ya menurut begini, kalau tadi Pak Firman menyampaikan bahwa dasar Pemerintah impor dari sisi regulasi ini menjadi keniscayaan, tapi ini juga tidak semena-mena Pemerintah menetapkan impor. Ada sisi lain bagaimana perlindungan petani, perlindungan masyarakat. Dan saya yakin regulasi ditingkat global yang diatur oleh WTO juga sama. Pada saat importasi semua produk termasuk pangan itu pada akhirnya berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan rakyat, bahkan negara tersebut bisa melakukan regulasi atau membuat regulasi untuk memproteksi rakyat.

Nah sehingga kalau disampaikan oleh teman-teman ya mohon maaf yang setuju impor. Lalu mengatakan bahwa itu hanya ijin, belum tentu dilakukan semua sesuai dengan kuotanya sambil melihat perkembangan dilapangan. Sekarang kita punya mekanisme enggak? Pengawasan yang sangat ketat sehingga produk impor itu tidak masuk ke pasar-pasar rakyat. Pasar-pasar yang bersentuhan dengan distribusi produk pangan rakyat kita. Kalau misalnya Pemerintah memastikan itu bisa dilakukan ya mungkin paling tidak ada suasana yang tidak seperti sekarang. Dimana petani menolak betul rencana impor tersebut. Nah sehingga menurut saya, Fraksi PDI-Perjuangan sudah jelas diawal. Tadi Pak Mindo juga sudah sampaikan, Pak Trisno juga sampaikan, Pak Ketua juga sampaikan.

Selain itu Pak Menteri, kawan-kawan semua. Pada saat kita bicara ribut masalah 1 juta ton impor beras, kita ribut enggak nih dengan 11 juta ton impor gandum. Kayaknya adem-adem saja. Nah kenapa gandum terus meningkat? Oh ternyata ada perubahan pola konsumsi di masyarakat yang tadinya beras mencapai 120 sekian kilo per tahun, sekarang turun hanya 90. Oh ternyata anak-anak muda sekarang dari 1 hari itu tidak semuanya makan beras, tapi mereka makan mie. Nah terjadi ini. Ini 11 juta ton nih gandum. Ya tentunya harus kita sikapi juga. Nah itu yang terkait dengan pertanian.

Yang kedua Pak Menteri Kelautan dan Perikanan masalah garam nih Pak. Saya terus terang masih bingung dengan neraca garam kita. Disampaikan oleh Menko Kemaritiman, kebutuhan untuk farmasi 5000 ton, aneka pangan 612.000 ton, untuk industri 2,4 juta ton. Saya hitung ya totalnya 3 juta ton. Nah Pemerintah memberikan sudah memutuskan ada impor 3 juta ton. Disisi lain produksi dalam negeri, disampaikan juga 2,1 juta ton. Nah sehingga kalau dari impor yang 3 juta dan produksi dalam negeri itu 5,1 juta ton. Nah ini sebenarnya neracanya seperti apa? Kok bisa berlebih gitu.

Nah terus yang kedua begini, kalau saya melihat Pak Indonesia kan enggak. Negara pantai terbesar ke-3 kalau tidak salah. Ada misalnya yang menyebutkan 120 kilometer, ada yang 84.000 kilometer. Taruhlah kita asumsikan 80.000 kilometer ini panjang pantai kita. Saya melihat Dapil saya ini Cirebon-Indramayu. Kabupaten yang terbesar memproduksi garam di Jawa Barat. Itu saya hitung terkait dengan panjang pantai dikaitkan dengan produksi garam yang bisa dilakukan, itu koefisiennya itu 0,25%. Sehingga di Indramayu itu Pak Menteri kita punya panjang pantai 147 kilometer. Indramayu bisa memproduksi garam sebanyak 37.000 setahun. Dengan asumsi Januari, Februari, Maret, April, Mei, itu tidak ada produksi Pak karena musim hujan. Nah sehingga kalau kita perhadapkan 80.000 kilometer panjang pantai Indonesia seharusnya kita punya potensi 20 juta ton per tahun. Tetapi kita bisa lihat baru beberapa sentra garam saja di Indonesia, Jawa Barat, ada 2 Kabupaten misalnya, Indramayu-Cirebon, Jawa Tengah, Pati, Jawa Timur, Madura, di NTT.

Nah tentunya ini menjadi harapan saya kedepan Pak Menteri untuk bisa juga menggali nih potensi-potensi di Daerah-Daerah lain yang punya panjang pantai yang saya yakin teknologi garam itu ya tidak ribet-ribet amat. Menghasilkan garam yang NHCL-nya diatas 90 juga ya tidak ribet-ribet amat. Dengan hanya sentuhan teknologi yang sangat sederhana dengan biomembran, dengan dikasih plastik bisa menghasilkan garam yang lebih putih dengan kadar NHCL yang sangat tinggi.

Nah sehingga tentunya saya berharap garam juga harus kita sikapi betul Pak. Jangan sampai semua regulasi yang berkaitan dengan importasi apa pun pada akhirnya menurunkan produksi. Sama seperti bawang putih. Pada Tahun '80-an Indonesia swasembada bawang putih, tapi pada saat mulai diutak-utik oleh yang punya uang, yang punya bisa dikatakan kartellah untuk pada akhirnya bisa diberikan ijin impor ya bawang putih ya akhirnya turun pada saat itu petani tidak mau lagi. Coba bayangkan garam harganya sampai Rp100,- per kilo. Mana ada orang yang mau jadi petani garam. Nah

sehingga saya menginginkan di kesimpulan selain beras yang 1 juta ton kita juga sikapi kesimpulannya terkait dengan impor garam 3 juta ton.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ono.

Apakah ada tambahan dari PDI-Perjuangan?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Ada tambahan Pak Budi.

KETUA RAPAT:

Pak Ansi, silakan Pak.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera buat semua.

Pak Menteri Kelautan dan Perikanan Pak Sakti Wahyu Trenggono yang saya hormati,

Pak Menteri Pertanian "Selamat Ulang Tahun" Pak. Beliau ulang tahun nih. 1-2 hari yang lalu.

Saya mungkin secara khusus Pak mau menyoroti soal impor Pak. Saya ingin katakan begini, dalam pembuatan kebijakan itu rujukan kita kan harus pakai data, dan negara ini punya lembaga khusus yang bisa dijadikan rujukan kalau kita bicara data. Itu BPS. Setelah ada data, tentu ada kajian. Dan dari sana ada keberpihakan dalam bentuk kebijakan. Kalau hari ini kita bicara soal WTO. WTO itu adalah rejim perdagangan internasional. Hari ini multilateralisme ekonomi. Itu sudah digantikan oleh dominasi, korporasi-korporasi pangan global. Saya menyelesaikan Tesis S-2 saya menulis secara khusus soal liberalisasi pertanian oleh WTO dan IMF. Nah terkait dengan importasi beras ini mestinya rujukan kita adalah data. Data mana? Data BPS Pak.

Yang kedua kepentingan nasional kita. Apa kepentingan nasional kita, perlindungan kepada petani, dan juga masa depan pertanian kita. Saya kira jelas begitu. Bung Karno sudah mengingatkan kepada kita bahwa jangan pernah kita menyerahkan selera ujung lidah kita dijajah oleh asing. Sebenarnya Beliau mau mengatakan bahwa kemandirian pertanian,

kedaulatan pangan itu sebenarnya orientasi kita. Pak Menteri Pertanian yang belum saya lihat adalah narasi tandingan ataupun narasi alternative ketika Rakortas itu yang membicarakan tentang pentingnya importasi 1 juta ton. Saya kira tidak ada yang salah kalau terjadi diskursus internal Pemerintah sampai sebelum kebijakan itu dihasilkan.

Sejauh yang saya amati sepertinya Menko Perekonomian ini sangat dominan memproduksi wacana tentang perlunya importasi beras 1 juta ton ini. Sementara narasi tandingan kita kurang nampak Pak. Saya ingin melihat kita lebih gereget lagi Pak. Saya ingin kita jangan sampai kalah lagi terus menerus soal ini Pak. Karena bagi saya ketika impor ini terjadi, sederhana saya ini sebenarnya membunuh petani secara sistematis. Menggunakan regulasi untuk bunuh petani. Apa indikatornya? Baru wacana saja harga gabah sudah jatuh Pak. Baru wacana harga gabah sudah jatuh. Itu soal impor. Dan saya berharap setelah rapat ini ada proses diskursus internal Pemerintah, dan itu bukan hal yang salah. Sejauh kebijakan itu belum dikeluarkan. Rujukan kita jelas Pak, data BPS Pak. Kepentingan nasional kita jelas melindungi petani.

Yang kedua soal anomaly kenaikan harga saat hari-hari raya terutama terkait dengan Ramadhan ini Pak. Kalau di negara-negara lain, negara luar kita lihat harga pangan itu justru cenderung menurun dan biasanya produsen atau pun pedagang itu ingin memanfaatkan peningkatan gairah masyarakat di hari raya ini. Tetapi fakta sebaliknya ketika menjelang hari raya, harga-harga pangan kita di Indonesia ini justru naik Pak. Nah saya mencatat ada beberapa hal Pak yang menjadi penyebab akan ini. Yang pertama, naiknya konsumsi dan permintaan masyarakat sementara respon pasokan tidak bisa dipastikan segera ada.

Yang kedua, ada penimbunan pangan secara sengaja di jaringan distribusi yang orientasinya adalah provit oriented untuk sekelompok kecil para pemain.

Yang ketiga, sumbatan distribusi akibat putusya konektivitas antar daerah surplus, dan daerah yang tidak surplus. Dan yang keempat adalah ketidaksiapan dalam memastikan kesediaan pangan ditambah sistem informasi yang simpang siur yang mengakibatkan terjadinya atau tekanan psikologis sehingga harga pangan ini naik Pak. Ujung dari ini semua yang ingin saya lihat Pak, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan perlu membuat sebuah pola. Sebuah pola yang bisa dijadikan roll model kedepan untuk mengatasi lonjakan harga-harga pada saat lebaran ini Pak.

Nah kenapa pada saat Ramadhan dan Lebaran itu terkesan distorsi pasar itu terjadi betul Pak. Pasar kita tidak bekerja secara sehat dan sempurna. Dan mohon maaf, mungkin ini masih sekedar hipotesis. Kesan saya ini rent seeking, aroma rent seeking ini kuat sekali Pak. Nah dalam konteks itu menurut saya Satgas pangan ini harus bekerja lebih kuat lagi Pak. Kalau tidak setiap tahun kita akan mengalami repetisi-repetisi kejadian seperti ini Pak. 2 hal yang perlu saya sampaikan.

Terima kasih atas kesempatannya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ansi.

Apakah ada?

Pak Ketua Pak Dedi.

Silakan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PG (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik.

Terima kasih.

Pak Pimpinan yang saya hormati,
Pak Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan.

Yang pertama adalah problem besar dalam pengelolaan pangan ini. Di Menteri Pertanian selalu membuat sebuah rencana untuk melakukan percepatan penanaman. Karena kan, hitungannya produksi pada Tahun 2021 itu berarti musim tanamnya yang bulan November, Desember, Januari, Februari yang panen. Dan kemudian maka langkah yang kedua adalah kita melakukan percepatan tanam pada musim tahun ini agar tercatat dan terhitung di Tahun 2021 hasil panennya. Tetapi dalam problem ini saya lihat ada problem koordinasi yang begitu lemah.

Yang pertama ketika bicara pupuk, semua mata tertuju kepada Kementerian Pertanian. Langkanya pupuk, keterlambatan pasokan pupuk, kemudian pupuk yang tidak sesuai dengan karakter tanah pada sebuah wilayah yang disubsidi. Padahal yang dibutuhkan itu adalah yang tidak disubsidi malah bahkan pupuk luar negeri seperti di Aceh. Keasaman tanahnya yang dibutuhkan pupuknya adalah pupuk yang dari Jerman, dan itu non subsidi harganya mahal. Sehingga produktivitasnya menurun karena petani tidak punya kemampuan untuk membeli pupuk non subsidi. Tetapi disitu aspek kewenangannya lemah Menteri Pertanian ini. Yang pertama dari sisi infrastruktur. Menteri Pertanian tidak memiliki akses terhadap seluruh jaringan infrastruktur pertanian, dari mulai hulu sampai hilir. Paling hanya kewenangannya adalah anggaran yang untuk jalan lingkungan pertanian dan saluran pertanian ini yang 200.000 per paket. Eh 200 juta paket yang tidak memiliki implikasi besar bagi peningkatan swasembada pangan.

Yang kedua bicara persoalan pupuk. Tidak punya akses karena yang menentukan pupuk itu adalah kewenangan Menteri Pertanian. Nah ini problem yang harus segera dibenahi diinternal Pemerintah kalau memiliki kesungguhan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian. Itu yang pertama.

Yang kedua, dari sisi sorotan seolah-olah teropinikan bahwa ada keraguan terhadap data yang disajikan. Ini yang harus menurut saya di internalnya dibenahi, memberikan keyakinan terhadap data yang dimiliki. Keyakinannya adalah benar enggak sih stok ini sekian, benar enggak sih hitungan hasil panen itu sekian. Sehingga memiliki keyakinan di internal Pemerintah. Sesungguhnya apa yang terjadi problem hari ini adalah urusan internal Pemerintah, koordinasi, komunikasi, dan itu diputuskan di Pemerintah. Sehingga di internal Pemerintahnya memiliki keyakinan bahwa data yang disajikan adalah data yang valid. Saya memberikan kemarin misalnya sajian data 5,1 ton per hektar. Itu kalau padi kan dibikin rata-rata. Kalau di Jawa daerah utara memang sampai. Gabah kering giling 5,1 tapi rata-rata hari ini itu Cuma 4,5 karena saya pelaku, saya nanam di wilayah utara. Tetapi di wilayah tengah itu, itu kuatnya hanya 4. Naik lagi ke atas gunung 3 sudah jago. Nah dari situ saja barangkali kedepan itu betul-betul dievaluasi. Aspek kemampuan untuk produksi. Itu yang pertama.

Yang kedua adalah persoalan *Food Estate*. Kita kan selalu cepat memberikan gambaran. 29.000 hektar atau 30.000 hektar. Padahal dari angka 29.000-30.000 hektar itu ada yang tergenang air, ada yang masih rawa. Sehingga kalkulasinya berapa sih yang diproduksi. Dari produksi ini berapa sih sumbangan untuk produksi pangannya. Dan kalau bicara pangan sesungguhnya kita bicara Jawa. Bicara beras itu bicara Jawa. Karena mungkin kalau di Papua tidak ngomongin beras. Di Kalimantan tidak begitu tinggi kebutuhannya. Kemudian di daerah-daerah tidak begitu tinggi. Tapi memang beras ini konsumsi di Jawa yang tingkat penduduknya sangat banyak, yang secara politik seksi. Ini yang menjadi problem pangan kita hari ini. Sehingga aspek-aspek hari ini saya minta Kementerian Pertanian untuk memberikan secara riil data dan angka yang memiliki angka yang optimis dan itu adalah angka pasti. Karena apa? Karena ketersediaan dan ketetersediaan itu harus pasti. Ini yang kita titik tekankan.

Kemudian yang berikutnya adalah bahwa yang hari ini juga harus diambil langkah-langkah adalah apa langkah negara, langkah Pemerintah ketika panen raya. Berapa uang yang disediakan oleh negara untuk menyerap gabah petani. Sehingga gabah petani tidak sensitive oleh isu, tetapi oleh kemampuan daya serap dari Pemerintah. Ketersediaan uang Badan Urusan Logistik untuk menyerap padi masyarakat, gabah masyarakat. Karena kalau pun memiliki ketersediaan pupuk yang cukup untuk membuat gabah masyarakat saya pikir gabah ini terjaga harganya. Karena faktanya di masyarakat penyerapan gabah sangat tergantung dari pasar. Petani itu tidak. Menurut saya yang terserap oleh Bulog dari petani itu tidak sampai 20%. 80% itu melalui mekanisme pasar, dibeli oleh para tengkulak. Nah para tengkulak hari ini Pak Mentan, membelinya hari ini memiliki jangka waktu hampir 1 bulan petani menerima uang tunai. Kenapa? Karena mereka menunggu beras terjual. Ketika beras terjual jadi uang baru dibayarkan. Jadi ini yang terjadi dilapangan dalam dunia pertanian. Mungkin kemampuan dan daya serap Pemerintah ketersediaan uangnya yang harus ditambah. Sehingga gabah petani bisa diserap sehingga nanti bisa dengan cepat terbaca ketersediaan pangan rakyat kita. Ini barangkali yang menjadi titik focus kita sehingga pangan ini adalah komodities strategis yang disiapkan oleh negara untuk 2

hal negara melakukan. Satu, menjaga stabilitas harga gabah petani. Yang kedua adalah menjaga stabilitas ketersediaan pangan. Kedua-duanya itu bisa disatukan dengan menghindari aspek-aspek yang bersifat politis.

Saya ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Jadi setuju enggak impor beras?

Anggota yang terhormat,

Saya hanya menjelaskan sedikit disini. Undang-Undang Cipta Kerja ada PP 27 Tahun 2021 perihal impor komoditas perikanan. Pasal 276 berbunyi penerbitan persetujuan impor komoditas perikanan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dilakukan berdasarkan neraca komoditas perikanan. Ayat (2)-nya neraca komoditas perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah ketersediaan komoditas perikanan yang dihitung berdasarkan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pergaraman. Jadi intinya, kalau sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, dalam mengajukan ijin impor garam itu dimintakan rekomendasi dari Menteri Perikanan dan Kelautan. Biasanya itu juga ada rekomendasi dari Menteri Perindustrian kalau untuk industri. Kalau sekarang ini sudah tidak ada dibutuhkan lagi. Cuma Menteri KKP menyajikan ini loh neracanya. Itu saja.

Jadi berhubung waktu kita langsung jawaban. Saya minta jawaban yang singkat tapi tegas.

Silakan Pak Menteri Pertanian, setelah itu Pak Menteri Kelautan untuk menjawab pertanyaan Anggota termasuk juga pertanyaan saya tadi perihal jahe yang campur tanah.

Silakan.

F-PKS (Drh. H. SLAMET):

Interupsi Pimpinan.

Ada pendalaman enggak Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Langsung Pak Slamet. Pak Slamet mau ngomong?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Iya.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Baik.

Terima kasih Ketua atas kebaikannya dan seluruh Pimpinan.

Rekan-rekan Anggota Dewan dan Bapak-Bapak Mitra, Pak Menteri KKP, Pak Menteri Pertanian yang saya hormati.

Ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait dengan pendalaman. Yang pertama, saya juga tadi diingatkan bahwa didalam Undang-Undang Cipta kerja ada alih fungsi pertanian yang disitu ada klausul yang memang semacam tidak wajib nanti untuk melakukan penggantian dari lahan itu. Sehingga saya ingin mendapatkan gambaran, bagaimana kemudian Pak Menteri untuk melindungi alih fungsi dari lahan yang memang cukup tinggi.

Berikutnya terus terang saya ingin mengulangi lagi Pak Menteri bahwa ketika kemudian mohon maaf rejim hari ini adalah semacam rejim impor maka 2024 saya berkeyakinan tidak hanya produk pertanian yang akan diimpor tetapi petani-petani yang akan diimpor kepada kita karena memang tidak ada keberpihakan dari Pemerintah untuk melindungi petani kita baik dari sisi produk maupun lahan.

Oleh karena itu terkait itu maka nampaknya saya ingin kembali mengungkap juga bagaimana kemudian kesiapan Pemerintah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Pangan terkait dengan dibentuknya Badan Pangan Nasional. Saya pikir kita kemudian harus berpikir untuk rakyat, tidak ego sektoral bahwa kewenangan kita kalau terbentuk ini diambil oleh ini, terbentuk ini diambil oleh ini. Tetapi kita berbicara tentang kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Kalau memang esensi dari Undang-Undang ini bagus kenapa kemudian tidak dilaksanakan. Ini juga kemudian menjadi pemikiran kita semuanya. Sehingga bagaimana kemudian petani-petani kita berdaya.

Terakhir saya juga ingin menyampaikan terkait dengan ingin penjelasan stok yang impor terus sementara cetak sawah yang sudah dilakukan itu kira-kira 6000 hektar itu kalau penjelasannya sudah selesai tentunya kita ingin mendengarkan hasil bagaimana gambaran hasil dari cetak sawah itu. Maksudnya terkait dengan produktivitas itu Tahun. Program sebelumnya, kalau tahun ini enggak ada program cetak sawah. Nah itu terkait dengan Kementerian Pertanian.

Untuk Pak Menteri KKP, saya ingin mendapatkan penjelasan. Mungkin masyarakat juga ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan takeline baru bahwa KKP reborn. Yang dimaksud *reborn* ini apa? Karena saya saya lihat

orangnya masih sama, mentalnya mungkin juga tidak berubah. Sehingga saya ingin mendapatkan rebornnya di apa ini?

Yang berikutnya, saya juga ingin mendapatkan dari KKP reborn ini terkait dengan blueprint tentang benur Pak. Kemarin dijanjikan mungkin minta waktu untuk membuat blueprint ini, kita ingin mendapatkan gambaran itu.

Dan yang terakhir, saya ingin mendapatkan tanggapan juga dari Pak Menteri terkait dengan impor garam ini juga. Jadi petani kita yang petani padi diserang dengan impor padi, kemudian petani garam. Mohon maaf, impor beras. Petani garam kita juga diserang dengan impor garam. Nah sehingga pertanyaan kita kan Pemerintah hadir dimana ini? Jadi seolah-olah rakyat kita itu *auto pilot*, enggak ada Pemerintah juga jalan, enggak ada Pemerintah rakyat juga bisa makan. Nah ini sehingga perlu penjelasan dari.

Itu saja Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Slamet tadi nampaknya kurang teliti. Ada 3 Pak, yang pertama impor beras, yang kedua impor garam, yang ketiga kita diimpor oleh virus corona.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI PERTANIAN:

Bismilahirrahmanirrahim.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV yang sama saya hormati, muliakan dan banggakan.

Pak Menteri KKP dan jajaran, Bapak/Ibu sekalian yang sama saya hormati.

Secara singkat Pimpinan. Yang pertama, substansi dari materi Rapat Kerja kita hari ini adalah berkaitan dengan kesiapan kita menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri. Saya ingin sampaikan dari data yang kami miliki dari persiapan dan kemudian observasi-observasi pada stok-stok yang kami miliki dan cadangan-cadangan, kami punya cara bertindak satu, cara bertindak 2, dan cara bertindak 3 yang kita siapkan. Inshaa Allah kalau semua jalan sesuai dengan konsepsi yang kita miliki adalah Ramadhan 12 komoditi yang ada. Sebenarnya 11 saja tapi kita masukan kedelai dalamnya. Aman Bapak, dan dalam kendali penuh. Walaupun memang harus disadari bahwa momentum Ramadhan dan Idul Fitri sebagai big session katakanlah istilahnya begitu. Big session sudah kebutuhan pangan kita. Tidak berdiri sendiri, karena harus kami susulkan dengan temporary agenda memback-up itu misalnya, untuk sapi yang kemudian daging sapi yang akan terganggu live

stock yang terganggu dari Australia itu. Memang kita punya cadangan nasional yang harus kita totally siapkan. Itu contoh saja. Dan harus dikirim dari semua Daerah dari Kalimantan, dari Maluku harus kita tarik masuk ke sentra-sentra daerah memiliki kecenderungan menuju defisit. Tetapi sesudah itu bagaimana kita menggantinya.

Oleh karena itu agenda berikutnya adalah yang kita potong, yang kita terpaksa harus lakukan harus dilakukan penggantian segera tidak menunggu momentum. Kalau kita butuh sampai 60.000. Katakanlah 60.000 ekor sapi yang harus siap maka pada proses yang segera 60.000 sapi yang kita potong itu tergantikan. Tentu dengan program-program yang harus dilakukan secara bersama. Sekali lagi itu menjadi bagian-bagian yang harus kita. adalah mendekatkan stok pada kebutuhan, pada daerah defisit dan mendekatkan komunikasi yang terkait dengan bagaimana mensupply dari daerah-daerah sentra produksi. Karena biasanya kalau terlambat disitulah proses stabilisasi harga akan menjadi masalah. Dan ketiga tentu melakukan percepatan-percepatan tanaman dan mengantisipasi segala yang terkait dengan iklim dan serangan hama-hama yang mungkin ada pada jangka panjang sehingga kita bisa melakukan ketersediaan. Beberapa hal adalah, juga di sistem itu adalah bagaimana. Memang membangun seperti sentra-sentra yang tadi beberapa Anggota Dewan menyampaikan bahwa perlu diperbaiki stok-stok yang harus ada. Jangan sampai stok misalnya yang sangat rawan itu misalnya cabe dan bawang merah yang harus memang pada tempat-tempat dryer atau cold storage yang membutuhkan.

Pimpinan, dan Anggota,

Secara umum itu. Namun semua pertanyaan dan tanggapan, minta maaf saya tidak sebut lagi satu per satu, akan kami jawab tertulis seperti apa yang diharapkan dalam waktu yang sangat singkat.

Yang kedua Bapak, kami punya data yang cukup. Kalau bukan data BPS yang kita percaya data siapa lagi. Jadi oleh karena itu kami enggak jawab, apa kepentingan yang ada. Hanya saja memang tugas Kementan itu adalah produktivitas. Jadi kalau kami masuk-masuk kepada stabilisasi dan lain-lain ini akan terus terang jauh. Kalau berkait iron stock, memang ini kewenangannya tidak dikami Bapak. Tetapi kalau kami juga mengkondisikan serapan, karena kami yang turun tangan. Dan kami berstrategi disitu Bapak kalau kami kurang-kurang teriak. Ijinkan saya karena kami lagi menyelamatkan April-Maret ini kurang lebih stok kita hampir 8 juta ke gabah kering panen. Ya setara kurang lebih 4,5 juta. Dan saya Cuma tidak-tidak saja kemudian tidak ada yang selamatin ini. Beri saya kesempatan Pak Ketua. Saya kira teriakan Komisi IV biasanya sudah seperti ini. Sudah ada telepon dari mana-mana Bapak. Jadi jangan kira forum ini tidak dalam pantauan langsung. Jadi biasanya seperti ini.

KETUA RAPAT:

Tolong tadi dijelaskan.

MENTERI PERTANIAN:

Tidak Bapak. Saya tidak bisa jelaskan itu. Ampun.

KETUA RAPAT:

Tolong dijelaskan perihal tadi produksi Maret-April berapa?

MENTERI PERTANIAN:

Kami punya data AWR. Yang pertama itu data BPS. Tapi data AWR kita juga menunjukkan data AWR itu ... langsung ke semua sentra yang ada termasuk kepada penyuluh. Itu masih cukup besar.

KETUA RAPAT:

Berapa perkiraan panen Maret dan April?

MENTERI PERTANIAN:

Kalau Maret itu sekitar 6 jutaan.

KETUA RAPAT:

Gabah kering giling atau beras?

MENTERI PERTANIAN:

Gabah kering giling. April itu sekitar 8 juta. Jadi kalau itu.

KETUA RAPAT:

Equivalen beras ton?

MENTERI PERTANIAN:

Bagi 50% saja Bapak supaya, betul lebih dari itu. Tapi dibagi 50% berarti kurang lebih tambah 6. Berarti ada 14. 14 bagi 2 lah Saya lagi persiapan dan saya kemana-mana ini Bapak. Membujuk bahwa ini ambil. Berikan saya kesempatan untuk tidak menjawab yang lain. Karena saya sudah jawab dengan data BPS. Data AWR kita ada, data dari Litbang ada, dari Statistik Pertanian Padi juga ada selain data BPS. Dan semua menyatakan data oke. Jadi ijin saya karena saya masih butuh waktu Bapak.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, ijin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tunggu.

MENTERI PERTANIAN:

Yang kedua Bapak/Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan bahwa memang beberapa komoditi pangan yang tidak melalui rekomendasi kita atau kita tidak.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri, tadi masih masalah panen.

MENTERI PERTANIAN:

Siap.

KETUA RAPAT:

Jadi nampaknya data dari Kementerian saja 1 minggu bedanya sudah banyak sekali nih. Saya minta data dari Kesekjenan. Bulan Maret 2021 diperkirakan panennya 8.351.000 gabah kering giling. Bulan April 8.246.000 ton gabah kering giling. Ekuivalen 9,6 juta beras. Tapi tadi Pak Menteri mengatakan hanya 7 juta, sudah beda 2 juta lebih

MENTERI PERTANIAN:

Beda Bapak. Ada gabah kering giling kan kita Cuma hitung-hitungan. Data yang benar itu ada disini semua. Saya Cuma memberi gambaran bahwa ada 3 data, 4 data yang kami miliki. Dan kemudian itu pun aman. Apalagi kalau data yang disajikan apa adanya. Tetapi kan kita sepakat bahwa Cuma 1 data yang bisa kita pakai panduan. Ada data BPS.

KETUA RAPAT:

Jadi data yang diberikan Sekjen ini enggak benar?

MENTERI PERTANIAN:

Benar-benar Pak. Benar Pak, persis sama ini.

KETUA RAPAT:

Berarti 9,7? Bukan Pak Menteri tadi ngomong 7 koma lebih? Supaya jelas ini masalah data.

MENTERI PERTANIAN:

Dibagi 50%. Beliau bagi 5 koma sekian persen.

KETUA RAPAT:

Eenggak begini loh, saya itu minta standar gini loh.

MENTERI PERTANIAN:

Tidak ada yang berbeda Pak.

KETUA RAPAT:

Standarnya begini, gabah kering giling itu kan ada standarnya. Dengan kadar air yang layak dijadikan beras misalnya 15 sampai 16 persen. Kan begitu kan?

MENTERI PERTANIAN:

Betul-betul.

KETUA RAPAT:

Berarti kan ekuivalennya kalau tadi dikatakan rendemennya kurang lebih mungkin tadi beda. Pak Momon bilang 5 koma lebih hampir 6. Pak Menteri bilang Cuma 50%. Jadi di Indonesia ini standarisasinya mengenai rendemen itu tidak ada. Intinya begitu.

Silakan Mbak Alien mau ngomong apa?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Baik.

Terima kasih.

Ini soal data yang dipersiapkan, tadi juga dipertanyakan oleh Pak Ketua. Mungkin hitung-hitungannya Pak Menteri kurang lebih averagenya seperti itu. Tapi Pak Menteri perlu diketahui bahwa Bulan Desember sampai Bulan Maret ini kan ada curah hujan dari tahun sebelumnya curah hujan yang begitu tinggi. Kemarin juga bersama Sekjen kami mempertanyakan soal apakah data persediaan hasil pertanian khususnya di beras baik pun di gabah kering giling ini sesuai apa tidak, karena kita ketahui bersama di beberapa Daerah-Daerah tertentu seperti di tempatnya Pak Ono juga terjadi banjir dan juga perhitungan-perhitungan ini harus benar-benar rinci Pak. Kebetulan juga kami mengetahui persis para petani padi juga ini mempermasalahkan tentang pupuk yang subsidinya juga tidak mudah didapatkan. Kenapa kami mempertanyakan ini, agar memastikan berapa sih kebutuhan keseluruhan rakyat Indonesia. Terus kemarin di BULOG juga kami pertanyakan Pak. 850.000 ton itu yang menjadi cadangan beras negara, apakah betul-betul wajib dikonsumsi atau memang sudah turun mutunya. Jangan sampai ada kelangkaan beras dan kita perlu memberikan.

Jadi kami ingin mempertanyakan ke pertanian ini khususnya di Pak Menteri bahwa menyakinkan data-data itu memang sesuai atau tidak. Kebetulan setiap kali paparan data kalau memang kita mengikuti data BPS sesuai dengan kesepakatan yang selalu dipakai oleh Pemerintah tapi selalu ada juga perbedaan Pak. Telah terjadi dilapangan seperti di Kalimantan juga seperti itu. Saya ada salah satu cases Pak Menteri yang ingin saya sampaikan. Misalkan. (bukan ini masalah data. Karena kan kalau bicara data kan enggak boleh ngasal kan Pak Ketua). Perkembangan rice estate di Kalteng tidak seperti yang telah dilaporkan. Raker yang lain-lain dilaporkan 9000 hektar, ternyata dilapangan terkendala aspek teknis, tergenang dan sebagainya. Kementan agar juga melaporkan lebih realistis agar kami tidak *missed* informasi. Nah ini yang maksudnya yang bisa berdampak dengan data yang Bapak paparkan tadi soal ketersediaan hasil panen padi dan gabah kering giling. Ini maksudnya permasalahan-permasalahan di lapangan.

Terima kasih Ketua.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ketua, ijin Ketua.

KETUA RAPAT:

Siapa yang interupsi?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ichsan Ketua, sebelah kiri.

KETUA RAPAT:

Dari Fraksi Golkar?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Iya.

Pak Menteri,

Saya mau tanya satu hal saja. Ini kan kita sering berdebat. Tadi Pak Ketua sama Pak Menteri ini kan memperdebatkan terkait dengan, sekali lagi data Pak. Saya minta ditampilkan saja Pak. Ini data BPS, data AWR. Kemudian asumsinya seperti apa? Ini kan sebenarnya proyeksi kan. Proyeksi kan asumsi Pak Menteri. Sekali lagi ini proyeksi. Kalau pakai metodologi kalau kemudian tadi pakai AWR misalnya nah ini seperti apa. Ya kita perlu perdalam dulu. Jangan sampai tadi ada terjadi perbedaan. Pak Sekjen dengan Pak Menteri saja sudah terjadi perbedaan karena asumsinya berbeda. Jangan kemudian ini kira-kira perkiraan 50% enggak bisa begitu Pak Menteri. Artinya coba kita tampilkan dulu seperti apa gabah kering giling dengan asumsi 15%, berapa asumsinya? Ini kan sekali lagi asumsi Pak.

MENTERI PERTANIAN:

Iya-iya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Itu yang pertama.

Yang kedua adalah tadi Pak Menteri bilang bahwa ada daerah surplus, daerah defisit. Ini kan problemnya adalah di distribusi Pak Menteri. Nah kalau kemudian ada problem distribusi seperti apa polanya dalam 1 tahun. Kita bicara neraca pangan kita, neraca beras kita dalam 1 tahun. Kita jangan hanya bicara Maret, April, Mei. Nanti pada saat masa tanam. Kita kan tidak bisa memproduksi Pak. Bukan tidak bisa memproduksi. Produksi kita kan cenderung turun. Nah kita coba tampilkan dalam 1 tahun ini seperti apa neracanya. Kemudian kita bicara daerah defisit, daerah surplus. Dari situ kan kemudian kita tahu sesungguhnya berapa angkanya. Nah dari situ baru kita tahu angkanya Pak Menteri.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi Pak Ichsan yang tadi dikatakan oleh Menteri defisit dan surplus itu perihal ketersediaan pasokan daging menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Bukannya beras, bukannya komoditas lain.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ya enggak apa-apa. Kita tampilkan saja misalnya ambillah pangan kita misalnya, 1. Beras, jagung, kedelai. Jagung, jagung pakan misalnya. Tolong bedain jagung pakan sama jagung pangan. Coba kita tampilkan dulu angkanya berapa. Bahwa kemudian ada daging, ada gula dan sebagainya. Ada 10 komoditas strategis menurut Perpres 48 Pak. Nah Perpres 48 itu kan sudah menetapkan. Perpres 48 Tahun 2016 menetapkan ada 10 produk pangan strategis. Tampilkan saja. Saya sudah lihat-lihat sini, lihat-lihat data ini tidak ada 10 pangan Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Ichsan,

Tadi awal sudah ditampilkan. Anda belum datang.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bukan, neraca pangannya Pak saya ingin tahu.

KETUA RAPAT:

Enggak dengar dulu saya ngomong. Sekarang minta ditampilkan lagi?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bukan. Persoalannya tadi Pak Menteri mengatakan bahwa ini asumsinya 50% gabah kering giling menjadi beras. Pak Sekjen terjadi perbedaan. Nah ini kita lihat dulu. Artinya kita tampilkan dulu Pak. Tapi disini enggak ada. Daerah pangan, daerah defisit itu enggak ada.

KETUA RAPAT:

Saya jelaskan dulu. Tadi sudah ditampilkan, sekarang Pak Ichsan minta tampilkan lagi. Tampilkan Pak Sekjen, tampilkan datanya yang tadi itu. Iya kan. Tampilkan kan gampang sih, Cuma sebentar doang.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Oke ditampilkan Pak

Boleh Pak Ketua saya lanjutkan?

KETUA RAPAT:

Ya bolehlah. Anda kan Fraksi Golkar masa enggak boleh.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ya saya mau tampilkan saja.

Begini Pak Ketua, Pak Menteri yang saya hormati.

Ini kan kita bicara stok dan perkiraan produksi dalam negeri. Tapi disini tidak menampilkan neraca daerah defisit, daerah surplus itu seperti apa distribusinya. Saya sudah melihat Pak Menteri disini. Datanya saya sudah lihat. Tapi kemudian bagaimana perkiraan defisit dan surplus dalam 1 tahun. Jadi kita bisa perkirakan. Oh ternyata memang di akhir tahun kita surplus, kemudian daerah defisit dan daerah surplus seperti apa. Kita tahu ada 5 atau 6 daerah produsen beras nasional seperti daerahnya Pak Menteri, asalnya Pak Menteri misalnya Sulawesi Selatan. Tapi daerah defisit yang lain seperti apa Pak. Nah ini kita minta ada pendalaman seperti itu. Sebelum kita ingin memutuskan apakah betul ada surplus. Kalau surplus memang ada Pak. Tiap tahun Pak kita selalu menampilkan, bukan hanya pada saat Pak Menteri ini. Sebelumnya Pak Menteri yang lalu juga mengatakan selalu surplus kita Pak. Tapi selalu ada impor juga. Kemudian ketika terjadi surplus harga beras naik. Nah artinya ini surplus dan defisit, daerah surplus dan defisit itu perlu kita perdalam Pak. Jangan hanya bicara pada tingkat produksi tapi bagaimana pola distribusi yang seperti kita perkirakan.

Nah apakah kemudian data BPS menampilkan itu? Kita coba dalam dulu Pak. Jangan kemudian kita mengambil kesimpulan. Saya setuju bahwa beras kita kemungkinan surplus, kemungkinan. Sekali lagi proyeksi. Tapi bagaimana pola distribusi antara daerah defisit dan daerah surplus, kita belum tahu. Itu Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya ini sudah ditampilkan dilihat.

Yang defisit berapa Kabupaten?

PEMERINTAH:

3 Provinsi.

KETUA RAPAT :

3 Provinsi.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ini Bulan Maret Pak. Iya kan, ini Bulan Maret. Nanti pada saat masa tanam di Bulan Juni sampai September kita bisa lihat. Ini yang hijau-hijau ini bisa turun lagi Pak. Yang saya minta yang 1 tahun. Sekali lagi Pak Dirjen Tanaman Pangan, saya minta yang 1 tahun. Kita lihat bagaimana proyeksinya. Jadi kebijakan apa pun yang terjadi itu tergantung dari daerah surplus dan daerah defisit. Ini Bulan Maret sekali lagi. Ini Bulan Maret tahun berapa, saya enggak tahu ini. Maret 2020 atau Maret 2021? Ini enggak dicantumkan Pak.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Ichsan?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Lanjut Ketua.

KETUA RAPAT:

Kita lanjutkan?

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Ijin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Terima kasih Pimpinan.

Kalau enggak salah kemarin juga saya sudah menyampaikan terkait dengan perhitungan produksi yang sudah menghitung tingkat kegagalan panen. Kalau enggak salah kemarin itu sudah dipotong 4% ya Pak Agung ya. Nah jadi memang dari awal kan kita sudah mempunyai beberapa perhitungan dengan berbagai macam aspek termasuk kegagalan. Sehingga ya mungkin kalau Pak Ichsan tadi ingin dihitung lagi ya sudah dihitung lagi, simple saja menurut saya.

Nah yang kedua begini Pak, tadi Pak Menteri menyampaikan tidak punya kapasitas pada isu distribusi. Tapi sekarang kan begini, apakah Pak Menteri juga yakin dengan 15 Triliun anggaran Kementerian Pertanian pada akhirnya bisa menggerakkan semua produksi. Kan enggak juga Pak. Yang dibutuhkan Pak Menteri selain kapasitas sebagai meningkatkan produksi kita juga perlu triger Pak. Perlu triger kepada petani, kepada swasta untuk bisa masuk pada industry pertanian. Pada saat hanya urusin produksi tanpa juga berpikir bagaimana distribusinya, penyerapannya kan sama saja Pak akan ada kendala. Kan selama ini juga kita tahu pada saat petani tanam porang semua. Pada akhirnya kita tidak siapkan distribusinya, ya enggak akan mungkin petani tanam porang lagi. Dulu tanam jabon. Nah sehingga ya tolong itu juga menjadi perhatian kita semua. Kita butuh triger Pak.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Ada lagi sebelum dilanjutkan jawaban.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Ijin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tolong jangan bicara impor beras lagi. Sudah selesai.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Oh.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Saya hanya mau nanya ketegasan Pak Menteri saja Pak Ketua. Begini Pak Menteri, saya hanya mau nanya ketegasan Pak Menteri. Pak Menteri sebagai Pak Menteri Pertanian setuju apa tidak ini impor beras? Saya nanya saja.

MENTERI PERTANIAN:

Setuju Bapak.

KETUA RAPAT:

Nanti saja dijawabnya.

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Oke, di kesimpulan. Terus saya nanya lagi. Selanjutnya bahwa pertanyaan saya, yakin enggak surplus ini sesuai dengan hitungan Pak Menteri? Yakin? Ya kita kan dari kemarin sudah rapat terus ya Pak Sekjen ya. Berarti yakin ini Pak Menteri ya? Surplus yakin, jumlahnya yakin. Kalau itu sudah diyakini berarti sebenarnya impor kan tidak perlu Pak. Kalau impor itu tetap dilakukan dan Pak Menteri diam saja, Pak Menteri dosanya besar sama petani. Oh dosanya besar Pak. Di tempat saya Pak, beras kemarin panen sekarang 32 Pak, 31 Pak. Pak Menteri menghilangkan Rp1000,- duitnya petani Pak. Yang mau impor. Kan yang mau impor Menteri Perdagangan. Kan Pak Menteri Pertanian yang disini. Ya tetap dosa dong produksinya. Kan mestinya melindungi petaninya. Yang surplus tadi Pak Menteri bilang, menyampaikan bahwa kita bagian Menteri Pertanian bagian dipertanian, bagian untuk produksi. Lah yang produksi saja di harganya. Berarti Pak Menteri dosanya besar kalau sampai terjadi.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Sunarna?

F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):

Iya itu saja Ketua.

Terima kasih.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ketua, tambahan sedikit Ketua.

KETUA RAPAT:

Banyak juga boleh kalau Pak Suhardi karena kita tahu masih ada badai Pak.

Silakan Pak.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Baik.

Terima kasih Pak Ketua.

Saya kira bukan kapasitas Pak Menteri untuk menjawab pertanyaan setuju atau tidak setuju terhadap impor beras. Tapi kita disini Komisi IV sebagai wakil rakyat yang tentunya melindungi kepentingan masyarakat dan rakyat, kita akan lebih melihat bagaimana petani terlindungi. Olehnya itu saya kira kita seluruh Fraksi disini hampir ya sepakat untuk menolak impor beras itu. Nah kalau kita sudah sepakat disini saya yakin Menteri Pertanian akan ikut dengan kita.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Memang kalau Partai Demokrat paling jago. Beda-beda tipis sama yang tampil tadi.

Silakan Pak Menteri dijawab kalau ada yang dijawab. Yang pertanyaan harus dijawab adalah pertanyaan saya tadi perihal jahe. Yang lain silakan dijawab maupun tidak ya silakan ya nanti kita lihat saja kesimpulan rapatnya seperti apa.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI PERTANIAN:

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV yang saya muliakan, hormati. Pak Menteri dan Bapak-Bapak sekalian.

Ya jahe ada di pelabuhan, Tanjung Priuk dan Tanjung Perak. Dan semua container dan lain-lain itu masih standby ditempat. Dan tentu saja akan lakukan pengawalan langsung untuk melakukan pemusnahan. Hanya saja memang ini membutuhkan biaya pemusnahan. Tadinya biaya pemusnahan itu biasanya dikembalikan kepada importir yang melakukan itu, tetapi sampai detik ini janji untuk melakukan itu belum dilakukan. Saya akan coba lakukan langkah-langkah besok minimal dalam minggu ini Inshaa Allah kita akan lakukan Bapak, karena memang ada aturannya. Diberikan dulu kepada importir sendiri untuk kembalikan atau lakukan pemusnahan. Cukup besar Bapak karena ini cukup besar, cukup banyak. Tapi saya janjikan ... itu salah kita segera lakukan. Apa pun di kita selain memang ini harus dimusnahkan. Dan kami yang menolaknya. Begitu banyak gempuran untuk meloloskan itu kami tidak lakukan, Demi Allah. Jadi sudah seperti itu Pak yang ada. Dan saya kira ini juga bukan hal gampang bagi kami untuk terus

mengatakan tidak. Dan saya janji Pak Kabarantan untuk dilakukan pemusnahan.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Komisi IV nanti diundang Pak dalam pemusnahannya.

MENTERI PERTANIAN:

Boleh Pak, boleh kita lakukan.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri,

Yang impor yang harus bertanggung jawab.

MENTERI PERTANIAN:

Betul.

KETUA RAPAT:

Karena impor ini kadang-kadang cenderung lebih banyak belagak bego. Mohon maaf Bapak, saya enggak ngerti peraturannya Bapak. Karena saya ini pengusaha kecil Bapak. Bisa masukin 9 kontainer kok pengusaha kecil. Masih bilang enggak ngerti. Sudah berkali-kali lolos masih saja begitu. Kalau bisa suruh yang bersangkutan, kalau enggak laporkan ke pihak berwajib Pak Menteri. Singkat saja sudah.

MENTERI PERTANIAN:

Siap.

KETUA RAPAT:

Kalau enggak besok ulangi lagi dia pasti.

Cukup?

MENTERI PERTANIAN:

Cukup Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Menteri Kelautan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Terima kasih Pimpinan.

Nanti mungkin kalau ada yang kurang jelas akan dibantu oleh para Dirjen saya. Terhadap pertanyaan tentang situasi atau volume ketersediaan ikan dari Ibu Renny tadi. Saya bisa sampaikan bahwa konsumsi per kapita ikan kita itu ada di 56,39 kilogram per kapita per tahun. Nilai tukar nelayan Januari 2021 di 1,283. Februari di 103,16 meningkat. Lalu kemudian nilai tukar pembudidaya ikan, Januari 101,26. Februari 101,52. Impor terhadap ikan itu ada 42.000 ton dengan nilai 65 juta US\$. Jadi sebetulnya lebih kecil daripada jumlah stok ikan yang diambil dari ... dalam negeri.

Kemudian soal garam. Didalam rapat dengan Menko Perekonomian, kemudian ada Menteri Perdagangan, lalu kemudian Menteri Peindustrian. Berdasarkan neraca stok produksi kita itu ada di 2.100.000. Nah lalu kemudian impor diputuskan 3 juta. Nah itu dominasi yang paling besar adalah di industry. Itu sebesar. Industri manufaktur itu sekitar 3,9 juta. Lalu kemudian aneka pangan dan lain sebagainya 1,3 dan 2,4. Nah kita ingin tentunya kedepan adalah bagaimana memperbaiki dari sisi produksi, peningkatan produksi garam rakyat. Di beberapa tempat sudah kita lakukan termasuk diantaranya adalah integrasi lahan garam untuk peningkatan produktivitas dari 60 ton per hektar per musim menjadi 120 on per hektar per musim. Kemudian pembangunan gudang garam nasional dan penerapan resi gudang. Lalu bantuan revitalisasi gudang garam rakyat, perbaikan jalan produksi, perbaikan saluran. Mohon maaf Pak enggak ada. waktu saya pergi ke kebetulan mampir ke Kebumen itu melihat tamel garam disitu dan sangat bagus garamnya sangat bagus sekali untuk keperluan kosmetik atau farmasi.

Lalu kemudian tata niaga. Perbaikan tata niaga dan perbaikan impor garam. Jadi neraca garam nasional harus dengan line yang sama yaitu menggunakan BPS. Sehingga perhitungan penawaran dan permintaan bisa jelas transparan. Kami KKP memberikan masukan terkait data ketersediaan garam domestic baik garam rakyat maupun PT Garam, sedangkan data kebutuhan disiapkan oleh Kementerian Perindustrian untuk selanjutnya ditentukan dalam Rapat Koordinasi terbatas, Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koodinator Bidang Perekonomian. Untuk industri garam perlu dilakukan sensus stok garam disetiap pabrik oleh BPS sehingga tidak lagi menggunakan data estimasi. Pengendalian harga garam rakyat melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 terkait penetapan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang memasukan garam menjadi bahan penting sehingga harga pokok penjualan bisa ditetapkan. Besaran impor garam 2021 agar mengacu pada realisasi impor garam Tahun 2020 sebesar 2,6 juta. Jadi sebetulnya dari kami 2,6 juta. Nah ini yang bisa kami sampaikan. Perusahaan pengimpor harus menyerap garam rakyat sesuai dengan kesepakatan pada Rakortas bidang perekonomian tanggal 18 Desember 2020 yaitu sebanyak 1,5 juta pada 2020.

Selanjutnya yang terakhir tadi dari Pak Slamet, penjelasan tentang takeline baru reborn. Nah ini mungkin diluar ini ya. Tapi saya sampaikan

bahwa kita ingin melihat secara menyeluruh yaitu soal salah satunya adalah PNBP. PNBP di sektor perikanan tangkap, PNBP disektor ruang laut, kemudian PNBP di sektor perikanan budidaya. Semua kita teliti, kemudian kita rumuskan untuk kemudian itu akan menjadi peningkatan PNBP yang signifikan dibanding dengan PNBP yang lalu hanya 600 Miliar dari spending daripada Kementerian sebesar 5 koma sekian Triliun. 5,4 Triliun kalau enggak salah. Nah itu salah satu. Nah aktivitasnya sangat banyak. Kalau menurut saya terhadap tim dan sebagainya, pandangan saya adalah tergantung dari Pimpinan. Nanti kita akan lihat dalam perjalanannya apa itu bisa dilaksanakan semua atau tidak.

Kemudian yang kedua soal BBL. Kajian kita, kajian kami sudah jelas bahwa demand itu ada 1 yang namanya Vietnam. Tidak ada demand lain kecuali Vietnam. Mereka tidak memiliki BBL, dan semua BBL-nya itu adalah dari Indonesia. Kalau nanti kemudian itu dibiarkan diberikan ijin untuk ekspor maka seluruh BBL yang ada itu akan dieksploitasi habis-habisan. Dan kita tidak memiliki kompetensi apa pun karena ada selisih harga yang cukup besar kalau dia sudah menjadi konsumsi dibandingkan dengan masih BBL. Nah sehingga keputusan kami adalah nyetok BBL tetapi kemudian. Stok ekspor BBL, lalu kemudian menggiatkan budidaya menjadi lobster yang sampai pada ukuran konsumsi.

Saya kira demikian.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Slamet cukup?

Mbak Alien 1 menit.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri KKP yang saya hormati,

Tentunya tadi Bapak telah menerangkan bagaimana dengan kebutuhan untuk Inshaa Allah kita menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan juga Idul Fitri. Kita ketahui persis situasi alam yang beberapa bulan terakhir ini, baik dari Bulan November sampai Bulan Februari, cuaca alam yang tidak memungkinkan banyak nelayan yang tidak bisa melaut dan itu juga menjadi kelangkaan ikan konsumsi baik di pasar maupun untuk di industrikan sangat susah dan menjadi harganya naik. Yang menjadi pertanyaan saya, paparan dari Kementerian KKP ini menyampaikan bahwa di awal bulan puasa 1

minggu pertama agak menurun, nanti minggu ke-2 mulai naik lagi, dan minggu terakhir lebaran itu mungkin stabil dan setelahnya stabil. Kita melihat saja Pak Menteri KKP, saya kemarin turun di beberapa Provinsi dan hampir semuanya menjadi naik harga pasar untuk perikanan. Ini juga kelangkaan-kelangkaan *cold storage* dan juga penyimpanan ikan pada saat musim panen ikan ini juga menjadi kendala Pak Menteri. Jadi karena memang ini kita berhadapan di bulan suci Ramadhan yang pasti juga di musim covid ini banyak orang yang beralih konsumsi juga katanya ikan itu. Bagus untuk meningkatkan daya imun tubuh. Tapi juga kita melihat bahwa banyak orang yang tidak membeli ikan karena harganya mahal.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mbak Alien.

Terima kasih kepada Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan yang telah menyampaikan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, kalau bisa dijawab dulu sama Pak Menterinya.

KETUA RAPAT:

Oke dijawab dulu Pak Menteri.

Silakan. Karena ini dipantau oleh Menko Ekuin.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Ya soal ikan berdasarkan data kita stabil situasinya. Bahwa terjadi kenaikan itu adalah di H+7, kemudian awal-awal puasa juga terjadi kenaikan. Lalu kemudian stabil kembali di H+3 lebaran. Jadi saya kira selain kalau tadi dikatakan misalnya dilautnya karena cuaca dan sebagainya menurun, kita masih punya ikan budidaya yang cukup untuk. Yang sekarang itu statusnya tidak *dicold storage* tapi di kolam-kolam. Jadi nanti kalau sebelum puasa mau berkenan melihat ke sektor-sektor budidaya boleh juga kita antarkan. Saya kira begitu.

Terima kasih.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Masalahnya berapa presentasi ... (suara tidak terekam).

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN:

Nah budidaya yang dimaksud itu termasuk yang budidaya laut.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

(suara tidak terekam).

KETUA RAPAT:

Cukup Mbak Alien?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

(suara tidak terekam).

KETUA RAPAT:

Bapak/ibu yang kami hormati,

Dari dialog, diskusi, saran, dan masukan Anggota Komisi IV sebelum acara ini kita akhiri akan dibacakan rancangan kesimpulan Rapat Kerja pada hari ini

Silakan Bu Ketua yang baru datang karena habis acara partai.

Silakan.

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINA, M.K.M.):

Baik.

Terima kasih Ketua yang baik hati.

Kesimpulan Rapat/Keputusan:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan persiapan dan ketersediaan pangan menghadapi Bulan Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional Tahun 2021.

Komisi IV?

Pemerintah?

PEMERINTAH:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Pemerintah cq. Menteri Pertanian menolak rencana importasi beras sebanyak 1 juta ton yang akan dilakukan pada saat panen raya, maupun pada saat stok dalam negeri melimpah.

Komisi IV?

ANGGOTA KOMISI IV:

Setuju.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua ijin Pak Ketua.

Bu Ketua ijin.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Menurut saya, kita tidak hanya sekedar importasi beras yang kita sorot. Tadi Pak Ono menyampaikan ada jagung misalnya. Kita harus *fair* saja, bahwa problem kita ini adalah produksi. Kalau memang kita bicara beras, jangan bicara beras saja. Termasuk juga garam. Kalau memang kita mau *fair*. Artinya kalau memang data produksi ini ... (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Ini Pak Ichsan, ini kan satu-satu dulu. Ini bicara beras dulu.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Iya.

KETUA RAPAT:

Karena yang sedang hangat ini adalah beras. Kalau Pak Ichsan enggak setuju ya dihilangkan. Kan begitu saja.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bukan. Saya hanya ingin menjelaskan saja bahwa persoalan importasi ini bukan hanya pada persoalan beras. Tapi ada banyak hal yang kita harus selesaikan. Jadi kalau saya dipoint 2 ini jangan hanya menolak importasi beras. Tapi ada beberapa hal tadi sudah disampaikan teman-teman di Komisi. Jadi jangan hanya disorot tentang beras saja, bahwa kita ini punya problem sebenarnya terkait dengan pangan. Jadi di point 2 ini jangan hanya kita bicara

sekedar itu. Nah sekarang, saya setuju dengan kalimat “bahwa pada saat panen raya dan saat stok dalam negeri melimpah” saya setuju. Tapi kita tambahkan lagi bahwa didalam Undang-Undang Pangan itu salah satu indikatornya bukan hanya sekedar stok tapi harga. Undang-Undang Pangan mengatakan bahwa impor bisa dilakukan kalau harga ditingkat konsumen dan stok itu bermasalah. Jadi point 2 sekali lagi saya mengatakan, jangan hanya bicara soal importasi beras Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Begini, begini. Coba redaksinya dimasukkan.

F- PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Bisa Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Tunggu dulu Pak Andi.
Sudah Pak Ichsan?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Sudah Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Andi silakan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Ya saya kira kesimpulan Nomor 2 ini merupakan konklusi dari pandangan fraksi. Jadi enggak boleh kita menghilangkan. Jadi saya pikir kalau Pak Ichsan mau menambahkan nanti mungkin di Nomor 3 saja. Tapi masalah beras ini kami menolak impor 1 juta ton Ketua. Ini sikap Fraksi PKS. Saya enggak tahu kalau fraksi yang lainnya. Jadi ya harus sama-sama dong. Jadi kesimpulan Komisi itu berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi. Kalau ada yang tidak setuju disebutkan saja Fraksi tidak setuju.

KETUA RAPAT:

Begini Pak Andi, Pak Ichsan bukan tidak setuju. Beliau sangat setuju sekali Cuma ditambahkan komoditas pangan lainnya. Itu loh Pak Andi. Beliau setuju. Kecuali saya enggak tahu Anggota yang lain ada yang enggak setuju. Anggota Fraksi Golkar itu diluar. Tapi Pak Ichsan pasti setuju kan?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Begini Ketua, saya hanya ingin menyatakan begini. Bahwa problem kita itu bukan hanya sekedar beras, importasi 1 ton. Tapi juga ada importasi garam. Di dalam pembahasan neraca yang saya baca di media (tolong koreksi Pak Menteri Kelautan dan Pak Menteri Pertanian). Kita membahas neraca produksi pangan nasional selama 1 tahun. Kita tidak bicara hanya sekedar pada saat lebaran. Tapi 1 tahun kita bicara, makanya kemudian kebijakan terkait dengan importasi ini jangan hanya disorot pada konteks beras saja. itu yang ingin saya menyatakan di point 2 ini. Ini semua berita muncul karena apa, karena ada Rakortas terkait dengan pembahasan neraca pangan nasional. Sekali lagi bukan hanya persoalan neraca beras nasional, neraca pangan nasional. Kita harus *fair* bahwa problem kita adalah pangan. Ada 10 komoditas pangan strategis didalam Perpres 48 '2016. Persoalannya adalah ini akan menarik kalau bicara importasi saya setuju kalau kemudian tidak boleh dilakukan pada saat stok dalam negeri melimpah dan pada saat panen raya. Saya setuju pointnya. Tapi pointnya jangan hanya sekedar beras, gitu loh Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Tadi Pak Ichsan saya tanyakan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Eenggak saya mau menjelaskan Pak Andi gitu loh.

KETUA RAPAT:

Eenggak, redaksinya apa ini? Coba. Usulan redaksinya apa?

F-PG (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Sebentar Pak Ketua.
Saya interupsi Pak.

Kalau Pak Ketua tanyakan usulan redaksinya apa, itu berarti secara substansi mau diubah. Jadi saya mengatakan begini, ini bukan soal persoalan importasi saja tetapi konteks importasi komoditas. Yang dipersoalkan oleh Komisi IV itu adalah aneh, pada saat surplus sebuah komoditas kemudian importasi itu dilakukan. Kalau defisit ya importasi harus. Tetapi kalau surplus dengan data BPS yang kita sudah diskusi panjang lebar maka aneh. Maka dalam konteks ini isu komoditas beras itu harus dibedakan dengan komoditas yang diimpor lainnya. Maka tidak boleh diubah point ke-2.

Terima kasih.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, ijin Pimpinan.

Ini saya menambahkan saja. Setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ansilema. Saya juga ingin menyampaikan, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ichsan. Begini Pak Ansilema, kita memang lagi fokus tentang pangan yang pada saat ini yang digembar-gemborkan 1 juta ton. Kita juga setuju pada saat stok yang berlimpah dan juga pada masa panen kita tidak melakukan tersebut. Tapi kita juga harus betul-betul melihat bahwa peraturan. Kemarin juga Cipta Kerja sudah disahkan bersama, bahwa kalau ada perbedaan harga dilapangan ini kita balik lagi Tahun 2018 itu, masalah yang sama juga tapi dipasar ada kenaikan harga yang luar biasa dan itu sekarang diatur untuk bisa mengimpor. Jadi ada tambahan-tambahan pangan yang perlu juga kita perhatikan selain beras. Kita juga melihat bahwa gula diimpor juga. Dan itu menjadi konsumsi terbesar juga di negara kita. Makanya kita juga perlu memasukan komoditi pangan yang hampir 11 komoditi itu ditambah dengan kedelai. Kita juga harus perhatikan hal tersebut sehingga kedepannya Menteri Pertanian untuk menyusun satu program untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia memang sudah sesuai dengan standar kebutuhan yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Maka dari itu perlu juga dengan komoditi-komoditi lainnya. Agar menjadi atensi kita bersama.

KETUA RAPAT:

Cukup?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Iya cukup.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Sebelah kanan Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya jadi begini. Ini khusus beras. Dibawahnya dibaca lagi nanti. Tidak bisa digabung-gabung. Kalau pangan, misalnya tadi dicantumkan komoditas pangan lainnya. Ya bawang putih kapan panen rayanya. Kecuali dibuat lagi nomor ke-3 atau ke-4. Itu loh.

Anggota setuju?

ANGGOTA:

Setuju

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

SEKJEN PERTANIAN (Dr. Ir. MOMON RUSMONO, M.S.):

Mohon ijin Pak Ketua.

Ada masukan Pak Ketua, untuk point 2. Ini kalau misalnya narasinya sedikit diubah. Artinya bahwa Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Pemerintah bahwa produksi saat ini stok tersedia. Selanjutnya Komisi IV DPR RI menolak impor. Jadi yang sepakat itu kenyataan bahwa produksi ada saat ini sedang panen raya. Sedangkan yang menolak impor Komisi IV. Ini masukan narasi dari kami.

KETUA RAPAT:

Coba redaksinya diubah.

SEKJEN PERTANIAN:

Komisi IV DPR RI bersepakat bahwa stok beras periode Januari-Mei 2021 surplus. Selanjutnya Komisi IV DPR RI menolak rencana importasi beras sebanyak 1 juta ton, dan seterusnya.

MENTERI PERTANIAN:

Pimpinan, secara jujur ingin saya katakan kepada forum ini bahwa rencana impor itu baru dalam wacana dan saya sama sekali belum melihat ada sebuah keputusan yang pasti terhadap itu. Oleh karena itu.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri belum tahu?

MENTERI PERTANIAN:

Belum.

KETUA RAPAT:

Akhir bulan ini akan diadakan MoU antara Republik Indonesia dengan Pemerintah Thailand.

MENTERI PERTANIAN:

Maaf-maaf, mungkin ini yang saya tahu. Oleh karena itu kalau pelibatan langsung ke Mentan untuk melakukan penolakan dan lain-lain saya kira kita tidak dalam legal standing yang ada saya minta maaf. Kalau masalah produktivitas yang kita sepakati bahwa kita sudah punya produktivitas yang besar seperti ada data BPS. Ini data BPS yang memang sudah seperti itu, dan diperkuat dengan data-data yang kita. Jadi saya pada legal standing itu dulu Ketua, mohon ijin. Bahwa yang lain bisa disarankan. Oleh karena itu melakukan upaya untuk penyerapan gabah saya lebih cenderung itu yang lebih kita dahulukan. Harus didahulukan penyerapan gabah yang harus dimaksimalkan oleh Pemerintah karena ini menjadi kepentingan yang sudah menunggu. Barulah selanjutnya kiranya tidak dilakukan impor pada saat-saat panen raya. Kira-kira begitulah. ... (suara tidak jelas).

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ketua.

F-PDIP (SUDIN, SE /KETUA KOMISI IV):

Iya.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Baik.

Kalau alinea ke-2 ini yang baru, Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian bahwa stok beras dari periode Januari-Mei surplus. Itu kita sepakat dengan Menteri Pertanian. Tapi selanjutnya Komisi IV DPR RI menolak rencana importasi beras ... Menteri Pertanian tidak masuk Ketua. Kita hanya disini. Jadi Menteri Pertanian tidak usah takut dengan itu karena tidak masuk didalam kesepakatan itu.

Terima kasih Pimpinan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan, sebelah kanan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Iya. Secara prinsip kami menegaskan tadi bahwa importasi ini akan mempengaruhi dan memperlihatkan bagaimana keberpihakan Pemerintah kepada petani. Kalau kemudian itu yang terjadi, Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementan dan KKP tidak setuju berarti kesimpulannya harus dibuat 2 hal yang kontradiktif. Kalau kemudian opsi 2 yang diambil tambahkan disitu bahwa Komisi IV menolak importasi dan Pemerintah tetap dalam pendirian mau impor. Kita harus ada 2 yang jelas. Karena apa? Karena ini kita wakil rakyat, kita sudah mendengarkan keluhan rakyat, sudah mendengarkan keluhan petani, dia tidak mau impor. Kita tidak mau membuat keputusan buta, akhirnya kita panggil Bulog. Kita RDP dengan Kementan. Menunjukkan data BPS clear. Stok cukup, kan begitu. Sehingga sebagai Wakil Rakyat kita menyimpulkan ada aspirasi menolak, data menunjukkan bahwa menolak juga menguatkan untuk itu maka DPR Komisi IV mendukung untuk menolak itu bahwa kemudian hari ini misalnya Pemerintah tidak sepakat, kita masukan dalam redaksi ini bahwa Komisi IV menolak Pemerintah tetap dalam keputusannya untuk impor. Supaya rakyat melihat bahwa DPR sudah berjuang, tapi disisi lain. Berarti anjing menggonggong kafilah berlalu. Apa manfaat kemitraan antara Pemerintah dan Eksekutif, mohon maaf. Jadi usulan saya kalau memang mau 2 dipakai, Pemerintah ditegaskan disitu bahwa Pemerintah dalam tetap pendiriannya tidak mendengarkan rakyat tetap melakukan impor.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Slamet begini, maaf Pak Ketua.

Saya rasa kami sepaham Pak. Kita ngerti semangatnya ini kita dimana. Tapi saya rasa kita disini Menteri Pertanian ini tidak dalam kapasitas untuk bicara sebagai Pemerintah. Dan kita tidak bisa melabel itu bahwa Pemerintah tetap menolak. Karena kan kewenangan untuk impor itu bukan ada di Kementerian Pertanian. Kalau saya Pak Ketua, saya rasa secara redaksional yang point ke-2 yaitu kalau kita catat yang penting jelas, Komisi IV ada keberpihakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Mohon maaf Pak Budi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Silakan Pak.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Kita tidak mau left service, satu itu. Kedua, kalau Pak Budi mengatakan ini tidak disebut Pemerintah. Sekarang definisikan, yang disebut Pemerintah siapa? Kalau memang harus Menteri Perdagangan. Kita sebut disitu Menteri Perdagangan. Jadi kalau yang dihadapan kita tidak bisa didefinisikan Pemerintah, siapa yang akan didefinisikan Pemerintah dihadapan kita.

Terima kasih.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua, saya boleh urun rembuk, kasih pendapat?

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Baik.

KETUA RAPAT:

Masalah redaksi ya?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Redaksi saja. Artinya kalimat 3 dan yang diusulkan oleh Pak Sekjen Kementerian Pertanian ini, itu kita kombinasi saja. Saya setuju bahwa kemudian tidak boleh melakukan importasi pada saat panen raya dan stok melimpah. Nah itu tambahkan saja di point itu. Jangan hanya (.) importasi sebanyak 1 juta ton. Lalu saya mohon maaf nih, bahwa betul kata Pak Budi bahwa kewenangan itu bukan di Kementerian Pertanian. Tapi kita ingin mengatakan bahwa pada saat panen raya itu tidak boleh ada impor, betul. Kan betul kata Pak Menteri Pertanian tadi baru rencana tapi tidak boleh dilakukan pada saat stok dan panen raya. Begitu kan Pak Menteri? Jadi jangan sampai kemudian ini merusak harga ditingkat petani. Bukan kemudian kita membatasi persoalan-persoalan importasi saja. Tapi persoalannya adalah importasi yang dilakukan pada saat panen raya dan stok melimpah. Sehingga mengancam kesejahteraan petani, kan begitu tadi kesimpulannya. Ya tinggal ditambahkan saja, begitu.

Itu Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINA, M.K.M.):

Baik.

Kita ulangi ya yang point 2:

2. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian bahwa stok beras periode Januari-Mei Tahun 2021 surplus. Selanjutnya Komisi IV DPRI RI menolak importasi beras sebanyak 1 juta ton pada saat panen raya maupun saat stok dalam negeri melimpah.

Komisi IV?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Bu, setuju-setuju. Cuma ini karena mungkin kausalitas, kalimat pertama dengan yang kedua ini kausalitas. Jangan pakai “selanjutnya”, “sehingga” saja. Jadi ada sebab-akibat. Sebab diatas akibatnya kita tolak dengan alasannya itu.

KETUA RAPAT:

Oke, setuju?

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Boleh enggak saya tambahkan supaya lebih jelas. Saya sih mau menambahkan begini, bahwa produksi beras dalam negeri dapat memenuhi konsumsi dan cadangan. Nah itu disesuaikan dengan Undang-Undang Pangan nih. Jadi bukan hanya surplus. Jadi produksi itu bisa memenuhi kebutuhan beras konsumsi pangan, dan cadangan.

KETUA RAPAT:

Kalau kata-kata “surplus” itu sudah bermaksud atau sudah bermakna akan mencukupi kebutuhan.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Ya ditambah itu surplusnya diakhir. Ini kan Pemerintah ini kan yang mengizinkan itu terkait dengan asumsi bahwa konsumsi dan cadangan itu kurang. Ini dari sisi kalimat disesuaikan dengan Undang-Undang saja.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua, Bu Ketua, boleh saya urun rembuk?

Cukup saja pakai surplus Bu Ketua karena cadangan pangan Pemerintah itu. Itu yang menetapkan itu bukan Kementerian Pertanian. CBP itu (Cadangan Beras Pemerintah) Itu bukan Kementerian Pertanian, itu Undang-Undang. Dan yang bisa memenuhi itu BULOG. BULOG harus mampu melakukan yang tadi Pak Menteri bilang, harus menyerap beras petani secara optimal. Jadi cukup saja dengan surplus itu. Tidak perlu pakai kalimat itu. Itu Pak Ketua. Mohon ijin Pak ... mohon ijin.

KETUA RAPAT:

Cukup dengan surplus ya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan, saya setuju dengan usul Pak Ono. Karena ya memang di Undang-Undang juga disebut bahwa Pemerintah harus mempunyai cadangan. Hari ini yang dipakai alasan untuk impor adalah terkait dengan estimasi cadangannya kurang, kan seperti itu. Sehingga perlu dicantumkan. Sehingga itu perlu dicantumkan. Kalau kemudian masalah redaksional tadi kalau wacananya adalah rencana impor. Yang ditolak ya wacana rencana impor itu. Jadi seperti itu.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pemerintah ijin.

Ini kan kita berbicara dengan Kementerian terkait yaitu Menteri Pertanian yang berbicara soal surplus. Untuk memenuhi konsumsi dalam negeri dan cadangan itu ada di Bulog. Jadi kita sekarang ada kesimpulannya ada di Pertanian, Menteri Pertanian yang berbicara tentang surplus hasil dari produksi petani.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Tapi data produksinya ada di Kementerian Pertanian. Itu yang menjadi dasar kita untuk menolak.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ya betul tapi ... (suara tidak jelas).

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Tetap harus ada hukumnya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Tolong yang tertib. Disini ada Pimpinan.

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINA, M.K.M.)

Baik.

Oke. Ada usulan lain?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Saya usul Pimpinan. Mungkin saya tambahkan sedikit. Saya setuju dengan Pak Ono ya. Bahwa betul terkait dengan konsumsi dalam negeri dan cadangan itu merupakan urusan Bulog, otoritas Bulog. Kita tidak lagi sedang menekankan otoritas Kementan disini. Yang kita setuju dengan Kementan itu adalah pada data surplus. Itu yang pertama. Kita setuju data surplus. Tetapi karena importasi ini menyinggng 2 hal, satu konsumsi dalam negeri, dan dua cadangan pangan Pemerintah, maka ini harus dieksplisitkan. Mengapa? Karena terus terang, mohon maaf nih. Ini kita nih ada distrust permainan kata-kata. Sehingga kemudian supaya ruang ini tidak menjadi abu-abu ini harus dieksplisitkan. Jadi menurut saya ya betul, surplus memenuhi konsumsi dalam negeri dan cadangan pangan Pemerintah. Terkait dengan argumentasi yang dikatakan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Cukup Pak Ansi Lema.

Jadi surplus/memenuhi konsumsi dalam negeri dan cadangan beras Pemerintah. Bukan "pangan", tapi "beras". Karena ini adalah konteksnya beras.

Anggota?

ANGGOTA:

Setuju Ketua.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

ANGGOTA:

Saya kira kalimatnya sudah sangat bagus.

MENTERI PERTANIAN:

Ya jadi memang selalu ukurannya itu seperti apa ketersediaan di Bulog Bapak. Kalau bicarac cadangan pangan Pemerintah, cadangan beras Pemerintah itu di Bulog. Jadi memang surplus itu ada di kita berdasarkan data BPS. Ya kurang lebih seperti itu. Saya belum tahu bagaimana, apakah kita harus masukan ini ataukah cukup dengan surplus berdasarkan data. Karena kalau kita menyinggung cadangan beras Pemerintah kita tidak bisa menjustifikasi sebelum panggil Bulog disini dan memberikan keterangan yang ada.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Sudah kemarin Pak rapat dengan Bulog.

MENTERI PERTANIAN:

Ya tapi ini kan tidak dalam konteks ini kesimpulan itu. Dia tidak dalam kesimpulan kita. Maaf saja. Saya sebenarnya tidak ada masalah dengan redaksional ini Cuma mungkin suatu saat kita bisa masuk dalam konteks apa Kementerian Pertanian menjustifikasi tentang cadangan beras Pemerintah. Disitu saja. Ini akan menjebak saya sendiri Kementan untuk bertanggungjawab dalam melihat cadangan beras Pemerintah. Kalau surplus bahasanya sangat umum dan sudah masuk didalamnya masalah cadangan dan lain-lain sebagainya. Ini Cuma *legal standing* kita untuk bisa mengatakan menjustifikasi ini masuk situ. Karena cadangan beras Pemerintah sama sekali tidak ada kaitan dengan Kementan. Mereka mengatakan itu ... stok yang dimana mereka bisa mengambil keputusan setiap saat.

KETUA RAPAT:

Atau begini saja, surplus/memenuhi konsumsi dalam negeri. Dan "cadangan beras pemerintahnya" hilang.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pak Ketua?
Bisa Bu?

Iya. Jadi walaupun level rapatnya berbeda di RDP. Tetapi saya pikir itu bisa menjadi sumber untuk kemudian kita mengambil keputusan. Sehingga kalau Kementan tidak mau mengambil keputusan terkait dengan itu karena tidak ada legal standingnya maka ya bisa dicantumkan disitu berdasarkan RDP tanggal sekian data yang disampaikan oleh Bulog bahwa memang itu maka cadangannya cukup ya kita menolak. Jadi karena kemarin Bulog kan dalam kesimpulannya menyampaikan kepada kita cadangan cukup Pak.

Seperti itu. Jadi kalau kemudian Pak Menteri menyampaikan tidak Bulog di forum ini tetapi Komisi IV sudah mempunyai data itu. Sehingga pada hari ini kenapa Komisi IV dalam hal ini dalam proses rapat mengusulkan untuk menolak itu. Jadi saya pikir ini penting karena ya kita juga tadi tidak hanya left service. Kita menolak yang pada akhirnya Pemerintah tetap jalani impor. Kita kembali ke rakyat, ya kita yang babak belur sebagaimana pembelaan kita. Seperti itu mungkin.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua ijin, boleh saya sampaikan.

Bapak/Ibu semua, teman-teman yang saya hormati.

Bahwa pertama, ini kita lihat kalimatnya adalah bersepakat dengan Pemerintah cq. Kementerian Pertanian. Yang kita hadapi didepan kita adalah Kementerian Pertanian. Dan Pak Menteri itu sudah menyampaikan bahwa cadangan beras Pemerintah itu bukan tanggungjawab Kementerian Pertanian. Satu.

Yang kedua, kesimpulan rapat ini kan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR. Kalau Pemerintah mengatakan begitu, mari kita sama-sama diskusi. Kalau kemudian sudah ada jalan tengah seperti yang disampaikan Pak Ketua ya sudah cukup saja itu. Kemudian kalau Pak Menteri setuju, silakan. Itu saya ingatkan saja Ketua.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri setuju?

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINA, M.K.M.):

Menurut saya ini jalan tengah ya Bapak/Ibu.

(RAPAT: SETUJU)

SEKJEN KEMENTAN:

Ini ada sedikit redaksional. Stoknya produksi diganti produksi, mohon ijin yang nomor 2.

KETUA RAPAT:

Ada perubahan setuju ya.

3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan ketersediaan pangan utama yang cukup dengan harga yang terjangkau sepanjang 2021 terutama pada puncak-puncak konsumsi seperti

puasa, dan lebaran, serta hari-hari keagamaan nasional lainnya dengan tingkat harga yang relatif stabil dengan mengutamakan supply dari dalam negeri dan sumber lain tidak dibutuhkan.

Komisi IV?

Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi, pengendalian dan sistem pengawasan yang komprehensif terhadap adanya impor pangan guna menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia yang tertuang dalam program kerja Tahun 2021.

Komisi IV?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bu Ketua, ya ini penekanannya adalah bahwa ada langkah-langkah antisipatif dan pengendalian. Nah kita minta nanti menagih pada kedua Kementerian ini untuk mengantisipasi itu. Jangan kemudian, artinya ini ... konteksnya adalah data. Saya pokoknya point 4 ini saya setuju bahwa ditambahkan saja bahwa langkah-langkah antisipatifnya seperti misalnya perbaikan data pangan nasional. Ini kan selalu simpang siur data kita ini. Jadi tambahkan saja "melakukan langkah-langkah antisipatif pengendalian, dan system pengawasan komprehensif termasuk didalamnya perbaikan data pangan nasional strategis.

KETUA RAPAT:

Coba dimana?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Melakukan langkah-langkah antisipatif termasuk memperbaiki data pangan nasional.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Tidak perlu diganti, eh tidak perlu ditambah. Hapus. Nanti di Nomor 6 ada.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Oh ada.

Ya sudah. Saya Cuma ingin ingatkan saja di point 4 ini. ... kita terkait dengan impor ini adalah karena datanya simpang siur antar semua Kementerian.

KETUA RAPAT:

Baik.
Terima kasih Pak Ichsan.
Anggota?
Pemerintah?

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Tolong dijawab pakai mic Pak karena ini direkam sebagai data.

MENTERI PERTANIAN:

Setuju Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah cq. Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan identifikasi dan pemetaan terkait pasokan dan harga pangan maupun barang kebutuhan pokok ditingkat nasional dan daerah, serta identifikasi kesiapan Pemerintah Daerah untuk menghindari terjadinya kekurangan pasokan, gangguan produksi pangan hingga permasalahan ditingkat distribusi.

Anggota?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Tambahkan Bu Ketua, “dalam 1 tahun sepanjang Tahun 2021”.

KETUA RAPAT:

Paling akhir ya, “sepanjang Tahun 2021.
Anggota? Sepakat.
Pemerintah?

SEKJEN KEMANTAN:

Mohon ijin Pak.
Yang pemetaan itu mungkin bukan pasokannya, pemetaan dari produksinya. Wilayah mana defisit, wilayah mana yang surplus, kemudian juga mana harga pangannya. Kalau pasokan kan kesannya distribusi.

KETUA RAPAT:

Ditambah saja ya. Karena produksi dan pasokan, kan beda itu. Dua hal yang memang perlu diperhatikan.

Pak Menteri setuju?

MENTERI PERTANIAN:

Saya kira hanya kata harga mungkin.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN (Dr. Ir. AGUNG HENDRIADI, M.Eng.):

Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Ketua, saya minta ijin Pak.

Kalau pemetaan produksi. Kalau pemetaan produksi memang Kementerian Pertanian Pak. Tapi kalau pemetaan pasokan itu sebetulnya Kementerian Perdagangan Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Begini Pak Agung, kemarin. Bapak datang enggak waktu RDP dengan Dirjen Peternakan.

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Ada Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Mobilisasi pasokan ternak dari daerah ke daerah yang surplus ke yang minus. Berarti kan pasokan. Kok Bapak bilang tadi masalah perdagangan. Kemarin sudah dikatakan mobilisasi, misal dari Lampung ke Jakarta karena kebutuhan Jakarta lebih banyak. Coba siapa yang kemarin ikut RDP. Betul Pak Sekjen?

SEKJEN KEMANTAN:

Iya.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Iya kan. Jadi bagaimana?
Menteri setuju enggak ini?

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN:

Pak Ketua mohon ijin.

Yang disampaikan Pak Dirjen itu kan hasil Rapat Teknis dengan Kementerian Perdagangan. Ya tentunya mengeksekusi mobilisasi itu bukan Kementerian Pertanian Bapak.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pak Agung, kemarin Dirjen Peternakan mengatakan waktu itu ada Berdikari, ada Bulog. Akan memobilisasi pasokan daging yang surplus ke yang defisit. Kan begitu ngomongnya. Maka saya tanyakan, biayanya siapa yang nanggung? Betul kan?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Pak Ketua ijin Pak Ketua.

Pak Menteri dan Pak Agung,

Ini kan kita melakukan identifikasi dan pemetaan. Artinya dengan adanya harga bahwa pemetaan harga mengidentifikasi harga, mengidentifikasi mana daerah surplus daerah defisit itu untuk bisa memastikan data pangan kita itu aman. Dan ini salah satunya adalah memang tugas Pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Pertanian. Ya kalau perdagangan itu memang kita bicara bagaimana alur distribusinya, memastikan alur distribusi. Tapi mengidentifikasi, melakukan pemetaan itu kan tugasnya salah satunya kan boleh-boleh saja Kementerian Pertanian. Makanya kami di Komisi IV kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian KKP ini untuk melakukan identifikasi dan pemetaan. Untuk mengantisipasi semuanya. Tadi kan sudah ditampilkan surplus dan defisit. Itu kan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian sudah menunjukkan mana daerah surplus, mana daerah defisit. Dalam hal ini beras Januari sampai Mei. Walaupun disitu tidak dicantumkan tahunnya tahun berapa. Anggaplah itu Tahun 2021-lah. Tapi itu kan identifikasi. Jadi point 5 itu sah-sah saja menurut saya.

Terima kasih Pak Ketua.

MENTERI PERTANIAN:

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah cq Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melengkapi data kesediaan produksi pangan dalam menghadapi Bulan Ramadhan, dan Hari Besar Keagamaan Tahun 2021 ditingkat nasional, maupun yang berasal dari Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk data ekspor dan impor per komoditas, serta data kerjasama operasional dengan BUMN maupun Pemda. Selanjutnya data tersebut disampaikan selambat-lambatnya 1 minggu setelah Rapat Kerja ini berlangsung. Para Anggota?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Bu Ketua, menurut saya. Ijin Bu Ketua.
Boleh?

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Tidak hanya menghadapi Bulan Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan, tapi sepanjang Tahun 2021 Bu Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ini hapus saja “menghadapi Bulan Ramadhan, Hari Besar Keagamaan”.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Jadi seolah-olah bahwa hanya bulan-bulan, hari besar keagamaan kita terjadi persoalan. Tapi kita lihat sepanjang 2021 ini, apakah ada persoalan atau enggak.

Terima kasih Bu Ketua.

KETUA RAPAT:

... dihapus ya.

MENTERI PERTANIAN:

Boleh enggak sampai Ramadhan sampai Idul Fitri dulu. Nanti kita akan rapat berikut dan kita cantumkan berikutnya. Biar kita konsentrasi dulu pada menghadapi ini.

KETUA RAPAT:

Baik.
Balikin ya.
Begitu Pak Ichsan?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Siap.

KETUA RAPAT:

Anggota?

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Nanti dulu. Menghadapi bulan Ramdhan Tahun 2021. Jangan hari besar keagamaan lainnya. Ini kan hadir lebaran dan Ramadhan saja kan yang diminta oleh Pak Menteri kan.

KETUA RAPAT:

Hari Raya Lebaran itu pas Hari Paskah kalau enggak salah. Jadi menurut saya pas juga keagamaan lainnya.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Oh masuk dua-duanya. Nanti pemahamannya, kalimatnya bulan Ramadhan, Hari Besar Keagamaan sepanjang Tahun 2021. Tadi kalimatnya itu. Nah "sepanjangnya itu" dihapus. Di Tahun 2021 maksud saya.

KETUA RAPAT:

Oke. Ini sudah ya kalau begitu.
Sepakat?

(RAPAT: SETUJU)

7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah cq. Kementerian Pertanian memberikan jaminan lahan pertanian pengganti terhadap lahan pertanian yang terkena proyek strategi nasional khususnya pada lahan pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap.

Anggota? Setuju.
Pemerintah?

PEMERINTAH:

Sebentar Bu.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pak Momon, ini kan diusulkan kemarin oleh Fraksi PKS. Tapi RDP saya bilang dialihkan saja ke Rapat Kerja agar lebih mantap. Pak Momon menjawab, ya setuju besok. Gitu loh. Pak Momon jangan bingung Pak. Sebentar lagi Pak Menteri potong kue, ulang tahun ini.

ANGGOTA KOMISI IV:

Saya kira enggak ada masalah. Yang namanya harapan ini kan kesimpulan Ketua.

MENTERI PERTANIAN:

Ijin Pimpinan.

Anggota Komisi IV,

Dalam Undang-Undang Nomor 41 2009 tentang alih fungsi lahan. Itu kewenangan penggantian dan proses perijinannya tidak di Kementan Bapak. Dia berada di Pemerintah Daerah dan ATR BPN. Oleh karena itu mempersyaratkan ke Kementan ini barangkali sangat menjadi sebuah beban yang diluar dari aturan. Jadi seluruh kompensasi terhadap penggantian lahan sepenuhnya ada di perubahan Perda, RTRW Daerah. Dan RTRW Daerah itu harus sudah bisa mencantumkan daerah mana, apa sebabnya? Kan disana ada ancaman hukumannya. DPR yang setuju mengalihfungsikan atau siapa pun yang bertandatangan dalam konspirasi itu dikenai hukuman 7 tahun. Jadi ada hukumannya Bapak mengalihfungsikan itu. Sehingga kalau ini saya kira kalau diangkat ke atas, menurut saya agak menjadi beban yang keluar dari konteks Undang-Undang 41 '2009 itu. Ada Pasal 71 disana menyatakan seperti itu.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Ijin Bu Ketua.
Oke.

Pak Menteri,

Saya sebelum ini saya mau bertanya dulu. Ada tidak daerah yang sudah melakukan alih fungsi diberikan sanksi oleh Pemerintah selama Undang-Undang itu diterbitkan sampai detik ini, ada enggak? Sanksinya baik itu administratif, atau sanksi pidana. Ada enggak sampai saat sekarang detik ini satu daerah yang melakukan alih fungsi itu diberikan sanksi?

MENTERI PERTANIAN:

Pernah masalah Undang-Undang 41 '2009 itu heavynya ada di Provinsi dan Kabupaten, maka memang semuanya ini menjadi tanggungjawab Undang-Undang ke Daerah. Posisi Kementan adalah posisi yang bisa melakukan pemberatan atau gugatan terhadap sebuah perubahan status alih fungsi itu, sama dengan masyarakat biasa. Nah sekarang kalau pertanyaannya, apakah ada yang disanksikan sebelum itu? Ini yang saya belum bisa jawab. Kelihatannya itu saya sependapat bahwa itu belum pernah dilakukan. Terutama di Jawa Pak.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Baik.
Bu Ketua, saya boleh jawab?

KETUA RAPAT:

Baik.
Silakan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Konteksnya adalah selama ini tidak ada satu pun daerah diberikan sanksi terkait dengan alih fungsi lahan. Karena Pemerintah Pusatnya dalam hal ini Kementerian Pertanian tidak memberikan proteksi Pak. Artinya di kalimat point 7 ini, ada pemberian sanksi, admin sanksi secara administrative atau sesuai dengan Undang-Undang Pak. Artinya kalimat point 7 adalah memberi jaminan lahan pertanian pengganti itu adalah bagian dari upaya Kementerian Pertanian untuk melindungi lahan pertanian produktif. Pointnya itu. Tujuannya sebenarnya itu. Tujuannya. Artinya ada guarantee dari Kementerian Pertanian untuk melindungi lahan pertanian berkelanjutan.

Itu Bu Ketua.
Terima kasih.

MENTERI PERTANIAN:

Menurut saya Pimpinan, ini harus ditarik dalam 1 Rapat Kerja tersendiri karena ini tentu kita berhadapan dengan aturan-aturan hukum, dengan kompetensi koordinasi kelembagaan yang harus ditata. Barangkali ini akan harus mengubah PP, dan lain-lain dari turunan Undang-Undang itu. Itu yang menjadi kelemahan. Bagaimana mengatur kelembagaan yang ada dan koordinasinya seperti apa, pengawasannya seperti apa, siapa tanggung jawab apa, dan sanksinya seperti apa. Saya lihat ada kelebihan struktur dalam Undang-Undang 42 termasuk 3 PP yang mengaturnya. Sehingga kita tak berdaya. Kalau DPR sudah setuju untuk mengubah RTRW nya dari kawasan yang ada, alih fungsi lahan terjadi dan kemudian kita tidak bisa bikin apa-apa Bapak. Dan itu berbahaya sekali bagi kepentingan. Saya setuju kalau ini kalimat ini masuk dalam 1 rapat teknis tersendiri untuk kita coba kaji lebih jauh terhadap hal ini. Saya siap untuk itu.

KETUA RAPAT:

Kalau misalnya didepannya diberi kata "melalui". Jadi Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. (oh enggak usah). Melalui Kementerian Pertanian untuk memberi jaminan itu bisa enggak.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, ijin Pimpinan.

Saya ingin menyampaikan bahwa ini sebenarnya pelepasan kawasan hutan atau beralih ini kan tidak di Kementerian Pertanian. Jadi ini ditata ruang juga, pengalihan hutan ini juga masuk dengan KLHK, terus juga ada Menteri Agraria juga ada disitu. Jadi ini tidak bisa diberikan satu. Karena kita sudah pernah di daerah. Memang kalau sudah disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPR untuk pengalihan fungsi itu memang Pemerintah Pusat tidak bisa lagi untuk turun memberikan intervensi seperti itu. Jadi ini tidak bisa Ketua. Jadi menurut saya mungkin bisa di drop dulu pada saat ini. Nanti kita rapat kemudian baru kita masukan dengan Kementerian-Kementerian dengan masalah tersebut.

Terima kasih.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Jadi kan kendalanya adalah setiap Provinsi punya Perda. Peraturan Daerah yang dibuat atas turunan Undang-Undangnya itu. Kalau dibilang melanggar ya melanggar. Contoh, kemarin saya sudah katakan dalam RDP. Pembangunan jalan tol Bakaheuni sampai ke Sumatera Selatan itu menghabiskan ribuan hektar sawah. Tetapi saya tidak pernah mendengar ada lahan penggantinya. Nah ini yang bertanggungjawab siapa? Apakah Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Pusat. Atau diubah saja nanti kita akan Rapat Gabungan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Ketua, saya tambah singkat saja sedikit.

Pak Menteri,

Mungkin semangatnya ini seperti yang disampaikan Pak Ketua barusan. Kita tidak ingin alih fungsi lahan ini tidak ada penggantinya. Tetapi problemnya adalah otoritas itu tidak ada di Kementerian Pertanian. Sepenuhnya ada di daerah karena desentralisasi dan otonomi daerah. Tetapi Kementerian Pertanian juga mungkin “kepada Pemerintah Daerah yang nakal-nakal” model kayak begitu kurangi saja bantuannya Pak. Ini harus jadi komitmen semacam daya tekan walaupun, karena tidak ada otoritas ya. Ini sikap yang harus kita ini. Kalau enggak. Kira-kira begitu Pak.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Sekedar mengingatkan kalau enggak salah kemarin Pak Sekjen habis rapat tentang Cipta Kerja kan. Saya sebenarnya agak-agak aneh juga kalau

ini masih dimasukin. Apa tidak dijelaskan masalah alih fungsi lahan ini sudah ada didalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berdampak langsung kepada alih fungsi lahan. Ngapain sampai sore kalau enggak ada hasilnya Pak Kan lucu. Kemarin rapatnya hari ini lupa ingatan. Saya enggak tahu siapa yang lupa ingatan Pak.

Terima kasih Pimpinan.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Interupsi Pak Ketua.
Ibu Ketua interupsi.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Ibu.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Pak Ketua, Bapak/Ibu sekalian.

Ini sebenarnya Asbabul Nujulnya itu dari rapat kemarin yang juga tadi kita sudah singgung tadi bahwa kita menginginkan redaksi ini masuk di kesimpulan rapat yang kemarin. Nah tapi atas usulan dari Pak Ketua dan sudah disetujui oleh Pak Sekjen kemarin bahwa menjamin redaksi ini agar ada Pak Menteri legal standingnya lebih kuat. Pointnya adalah terkait dengan alih fungsi lahan pertanian. Dan disitu ada kata "proyek strategis nasional". Kadang-kadang memang pada saat penyusunan misalnya kalau tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa kewenangan untuk mengganti atau jaminan lahan penggantinya itu ke Provinsi atau ke Daerah. Nah pada saat perencanaan Rt/Rw-nya, biasanya pada saat Pemerintah ingin atau menyusun sebuah proyek strategis nasional tidak peduli Pak, apakah itu sudah dimasukan dalam Rt/Rw atau tidak masuk saja ini proyek strategis nasional. Pemerintah dipaksa untuk ikut lalu dengan alibi alasan seperti itu Pemerintah Daerah juga beralasan karena ini proyek strategis nasional. Jadi masyarakat silakan terima saja. Kalau tidak diterima maka tidak akan ada lagi proyek strategi nasional. Kadang-kadang alasan seperti itu. Nah makanya kita mau menjaga ini. Kita menjaga jangan sampai dengan alasan-alasan seperti dan juga masuk diperkuat dengan regulasi. Alih fungsi lahan pertanian ini kemudian mengorbankan fungsi lahan yang produktivitas pertanian ingin kita dorong sebagaimana tadi Pak Menteri sampaikan bahwa tugas Kementerian Pertanian adalah mendorong produktivitas pertanian sebesar-besarnya.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Cukup Bu?

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Iya cukup Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Iya jadi begini, Menteri Pertanian bisa menjamin tapi enggak ada wewenang. Ini loh masalahnya. Iya kan. Menjamin kalau dijamin mau dia pasti. Tapi wewengangnya enggak ada. Apa kita ubah nanti kita adakan Rapat Gabungan Menteri Dalam Negeri, ATR/BPN. Jadi disitu kita tekankan kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri himbaulah Kepala Daerah baik Kabupaten, Provinsi, maupun Kotamadya menjamin alih fungsi lahan.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Setuju Ketua. Setuju.

KETUA RAPAT:

(suara tidak terekam).

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Ya masukan. Yang disini kita ganti Bu.

F-PG (Ir. ICHSAN FIRDAUS):

Saya bantu redaksinya Ketua.
Komisi IV DPR RI akan mengagendakan Rapat Gabungan dengan Pemerintah terkait dengan upaya melindungi lahan pertanian produktif melalui jaminan lahan pengganti terhadap alih fungsi lahan tersebut yang terkena dampak dari proyek strategis nasional dalam Masa Sidang berikutnya.

KETUA RAPAT:

Baik, seperti itu ya.
Komisi IV DPR RI akan mengagendakan Rapat Gabungan dengan Pemerintah terkait dalam upaya melindungi lahan pertanian produktif melalui jaminan lahan pengganti terhadap alih fungsi lahan pertanian produktif yang terkena dampak proyek strategis nasional dalam Masa Sidang berikutnya.
Para Anggota?
Pemerintah?

SEKJEN KEMENTAN:

Kalau terkait dengan.

KETUA RAPAT:

“tentang ...” Apa Pak Momon?

SEKJEN KEMENTAN:

Komisi IV DPR RI akan mengagendakan Rapat Gabungan dengan Pemerintah terkait dengan upaya dan seterusnya.

KETUA RAPAT:

Sudah ya?
Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

8. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kerjasama dengan Perum Bulog dan BUMN klaster dalam menyerap hasil produksi pangan yang berkualitas dan bermutu dari masyarakat guna mengantisipasi keamanan konsumsi dan distribusi pangan ke berbagai pasar.
Anggota?

PEMERINTAH:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Baik.

(RAPAT: SETUJU)

9. Komisi IV DPR RI mendesak kepada Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memfasilitasi pembangunan rantai dini pada kelompok-kelompok usaha pangan dan ikan untuk memperpanjang waktu simpan, menjaga kualitas, menjaga pasokan, dan harga yang menguntungkan bagi petani dan nelayan.
Anggota?

ANGGOTA:

Setuju.

PEMERINTAH:

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam 1 minggu untuk segera menuntaskan permasalahan impor jahe merah dengan memusnahkan komoditas tersebut yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak Provinsi Jawa Timur, dan Tanjung Priuk karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan.

Anggota?

ANGGOTA:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?
Silakan.

PEMERINTAH:

Ijin Pak Menteri, Pak Ketua, Bu Ketua.

Boleh enggak nawar sedikit yang terkait dengan waktu. Karena seperti dijelaskan Pak Menteri tadi Pak Ketua, itu barang disana terus kemudian Undang-Undang memang harus pemilik yang memusnahkan pembiayaannya oleh Pejabat Karantina tapi dibiayai oleh pemilik. Nah kemarin kami dapat kalau yang di Priouk ini secara prinsip pemilik sudah setuju Pak. Tapi yang di Tanjung Perak Surabaya itu masih ada kemarin perdebatan dengan itu. Sehingga kami harus mencari koordinasi dengan pemiliknya kesiapan pembiayaan dari mereka Pak Ketua. Kalau boleh kami menawari 2 minggu Pak Ketua kasih waktu kepada kami untuk menyelesaikan ini dengan baik Pak Ketua. Karena misalnya ijin Pak Ketua, kalau misalnya dia bilang karena kemarin yang di Surabaya malah bilang perusahaannya pailit. Saya bilang kalau pailit berarti kan harus ada bukti dari perbankanlah maksud saya. Sehingga mungkin ini butuh waktu yang untuk di Surabaya. Tapi kalau Priouk sudah prinsip setuju bahkan hari Senin pun bisa kita lakukan Pak untuk yang di Priouk yang 4 kontainer. Ijin Pak Ketua.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Masalahnya begini Kepala Badan, saya sudah meminta 1 bulan lalu untuk dimusnahkan. 1 bulan lalu saya sudah minta, minta tolong dimusnahkan daripada ini lolos. Ada enggak yang lolos? Ada. Bukannya enggak ada yang dibersihkan dulu siram pakai air saja.

Anggota bagaimana? Apa mau diberi waktu lagi?

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, memang ini permintaan Ketua sudah lama benar dan ini sudah masuk juga. Tapi dalam 1 minggu paling lambat 2 minggu. Selambat-lambatnyalah. Itu kebaikan yang luar ekstra biasa oleh Bapak Ketua Sudin.

PEMERINTAH:

Setuju Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Masukan tambahan katanya.

KETUA RAPAT:

Baik. Ada tambahan selambat-lambatnya 2 minggu ya.

PEMERINTAH:

Setuju Bu.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Saya minta tolong waktu pemusnahan ada Anggota Komisi IV yang diundang untuk menyaksikan.

PEMERINTAH:

Siap Pak Ketua.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Setuju Pak Menteri?

MENTERI PERTANIAN:

Setuju.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Silakan yang mewakili Pemerintah, Menteri Pertanian atau Menteri Kelautan untuk membacakan kata akhir dalam Rapat Kerja hari ini.

MENTERI PERTANIAN:

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang kami muliakan, kami hormati, dan banggakan.

Pak Menteri KKP bersama jajaran, dan Sekjen bersama seluruh Eselon I, II dari Kementerian, Bapak/Ibu sekalian.

Alhamdulillah Wa Syukurillah, hari ini dengan segala kerahmatan Allah kita selesai dengan Rapat Kerja yang memang menurut saya menjadi sesuatu yang dibutuhkan diharapkan oleh masyarakat seperti apa sebenarnya kita bersinergi bersama mempersiapkan kebutuhan pokok yang hari-hari ini dengan berbagai isu yang ada cukup menggelisahkan Bapak, dan kami juga di lapangan. Ijin, mungkin dari Kementerian Pertanian bahkan kami turunkan semua Eselon I untuk melakukan monitoring. Tentu atas nama Menteri Pertanian dan junior Menteri menyampaikan rasa hormat kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan. Saya kira banyak hal. Di luar forum pun tentu penilaian kami kita akrab-akrab di Komisi IV Bapak. Saya ditunjukan saja apa yang harus saya lakukan Inshaa Allah. Seperti itulah komitmen kita semua mau melihat ada perbaikan-perbaikan. Saya merasa sebagai Menteri Pertanian banyak sekali dibantu baik secara tersirat maupun tersurat dari pertemuan ini saya menyampaikan terima kasih. Maafkan kami berdua kalau ada kurang. Kami siap mendapatkan terus bimbingan dari Komisi IV.

Terima kasih Pimpinan. Ridho Allah bersama kita.
Sekian.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Jadi Pak Menteri,

Anggota Komisi IV ini kalau berkata kencang itu karena sayang dan cinta sama mitranya. Bukan karena musuh, bukan.

MENTERI PERTANIAN:

Siap.

KETUA RAPAT:

Kalau musuh ya nanti kita kan bukan mitra lagi.
Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan, kekhilafan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrobil'alamin, Rapat Kerja ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.30 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Thomy
NIP.196508171988031002